



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Hadiwijaya 44 Demak, 59511

 (0291) 685934

 dinkes@demakkab.go.id

 dinkes.demakkab.go.id/

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025. LKjIP Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kesehatan Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, 2026

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak



dr. Ali Maimun, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 200212 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Kabupaten Demak merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 - 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) dan memuat pernyataan Visi, pernyataan Misi yang diemban, dan tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2026. Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah mempunyai 3 tujuan yaitu Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dengan target 75,91 tahun; Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah dengan target angka 85,13; Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan Daerah dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat dengan target angka 91,50. dan mempunyai 5 sasaran yaitu Menurunnya Angka Kematian yang memiliki 2 indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 7,25 per 1.000 KLH; Angka Kematian Ibu (AKI) dengan Target 63,50 per 100.000 KLH; Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya yang memiliki target 100%; Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Indikator Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri dengan target 100%; Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai target, dengan target 100%;. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan Indikator persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti yang memiliki target 100%. Dinas Kesehatan Daerah melaksanakan 1 program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100%; Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100%. Dan melaksanakan 4 program urusan pemerintahan wajib yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan dengan target 100%; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan indikator persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 100%; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan Indikator persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat Kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan dengan target 100%; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan Indikator persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) dengan target 93,6%; serta melaksanakan 21 kegiatan dengan 90 sub kegiatan.

Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 9 indikator Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 terdapat 7 indikator dalam kategori Sangat Tinggi dengan Skala nilai capaian kinerja $91 \leq 100$ meliputi Indeks kepuasan masyarakat dengan realisasi kinerja 91,52; Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan realisasi 100%; Angka Harapan Hidup (AHH) dengan realisasi 76,08; Angka Kematian Ibu (AKI) dengan realisasi 38,11; Angka Kematian Bayi (AKB) dengan realisasi 6,73; Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya yang telah mencapai 100%; Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri dengan realisasi sebesar 100%, dan terdapat 2 Indikator yang belum capai target yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi 84,15; dan Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target dengan realisasi 88,89. Dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini terdapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya adalah belum optimalnya pelayanan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan; Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Tingginya angka kesakitan dan angka kematian; Masih adanya kasus kekurangan gizi; Rendahnya budaya gerakan Masyarakat hidup sehat (Germas).

Realisasi dan Capaian Anggaran

Target Pendapatan Urusan Dinas Kesehatan Daerah Sebesar Rp. 281.878.179.918,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 299.460.515.332,83 (106,24%). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 607.525.465.986,84 dengan Realisasi sebesar Rp. 575.004.529.642,20 atau sebesar 94,65%.

Berdasarkan rumusan penghitungan efisiensi dan efektivitas terhadap capaian kinerja dan anggaran pada tujuan Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan adalah 100,02% dan realisasi anggaran sebesar 94,01% dengan efektivitas sebesar 106,38% dan efisiensi sebesar 6,00% (Sudah efektif dan efisien), pada tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan capaian kinerja sebesar 98,85% dan realisasi anggaran sebesar 93,93 dengan efektivitas sebesar 105,23% dan efisiensi sebesar 4,92% (Sudah efektif dan efisien), dan pada tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat capaian kinerja sebesar 100,22% dan realisasi anggaran sebesar 94,65% dengan efektivitas sebesar 103,40% dan efisiensi sebesar 3,29% (Sudah efektif dan efisien).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GRAFIK	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.2 Tugas dan fungsi.....	4
1.3 Isu-isu strategis	4
1.4 Keadaan pegawai dan sarpras	6
1.5 Keuangan	10
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. PERENCANAAN STATEGIS.....	13
2.1.1. Visi Dan Misi Kabupaten Demak	13
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah	14
2.1.3. Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan	15
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	25
2.4. Kebijakan.....	39
2.5. Perjanjian Kinerja	40
2.6. Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. CAPAIAN KINERJA.....	50
3.1 ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS	51
3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, 2024 terhadap Target Akhir Renstra Th.2026	51
3.2.2 Analisis Penyebab Kegagalan / Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan	74
3.2.3 Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja	76
3.2.4 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya	78
3.2.5 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja	97
B. REALISASI ANGGARAN.....	97
BAB IV PENUTUP	113
4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN DAERAH	113
4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	114
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025	6
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak	9
Tabel 2. 1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025	14
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan.....	15
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.....	23
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.....	26
Tabel 2. 5 Kebijakan Strategis yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.....	39
Tabel 2. 6 Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025	41
Tabel 2. 7 Definisi Operasional dan Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	42
Tabel 2. 8 Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025	43
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	50
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak	51
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	53
Tabel 3. 4 Rincian Penilaian IKM berdasarkan Unsur Pelayanan.....	53
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya.....	57
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinkes Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	60
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya.....	63
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator AHH Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	65
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	68
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	70
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Terakreditasi Minimal Madya Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	72
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	73
Tabel 3. 13 Tingkat Capaian Efektivitas dan Efisiensi Tujuan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025.....	79
Tabel 3. 14 Tingkat Capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025.....	81
Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.....	84
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025	98
Tabel 3. 17 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	99

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.....	105
--	-----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan IKM Dinkesda dengan OPD Lain	55
Grafik 3. 2 Keluhan Masyarakat Tahun 2025	58
Grafik 3. 3 Nilai SAKIP Dinkesda Tahun 2022-2024.....	60
Grafik 3. 4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.....	61
Grafik 3. 5 Angka Harapan Hidup (AHH) Prov. Jateng Tahun 2025	65
Grafik 3. 6 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2025	69
Grafik 3. 7 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2025.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.....	3
Gambar 1. 2 Sarana Prasarana Kesehatan.....	10
Gambar 3. 2 Komponen-komponen Penilaian AKIP	59
Gambar 3. 3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	61
Gambar 3. 4 Komponen yang mempengaruhi AHH	66
Gambar 3. 5 Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG).....	76
Gambar 3. 6 Kegiatan Optimalisasi UHC Demak	76
Gambar 3. 7 Kegiatan Rumah Gizi Balita	77
Gambar 3. 8 Cengkraman Mata Elang	77
Gambar 3. 9 Latanza	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak terletak di jalan Sultan Hadiwijaya No. 44 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Daerah dibantu oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), Laboratorium Kesehatan (Labkesda), RSUD Sunan Kalijaga, dan RSUD Sultan Fatah.

Dinas Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Tugas Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat;
- 2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta pendanaan kesehatan;
- 4) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

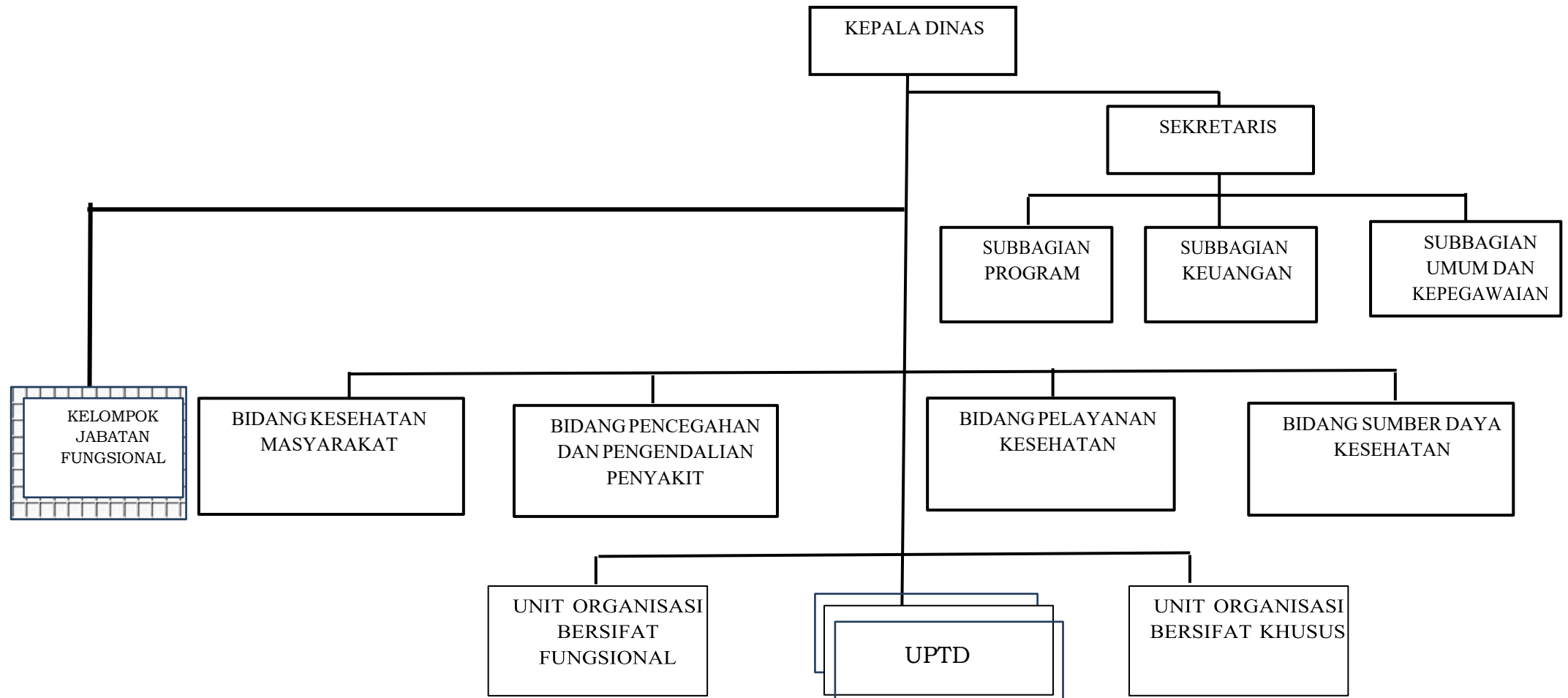
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Program; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi; Kelompok Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahkan Kelompok substansi Surveilans dan Imunisasi; Kelompok substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan Kelompok substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan Kelompok substansi Pelayanan Kesehatan Primer; Kelompok substansi Pelayanan Kesehatan Lanjutan; dan Kelompok Substansi Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang membawahkan Kelompok substansi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); Kelompok substansi Pengelolaan Pendanaan Kesehatan; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 7) Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- 8) Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan
- 9) Kelompok jabatan fungsional;

Struktur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari satu Sekretariat dan empat bidang, kelompok jabatan fungsional serta UPTD. Dinas Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Tugas Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat;
- 2) perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 3) perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta pendanaan kesehatan;
- 4) perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan;
- 5) pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang bersifat sangat mendesak dan harus segera diselesaikan dalam tahun perencanaan. Berdasarkan hasil telaah terhadap visi-misi Bupati Demak, telaah terhadap renstra kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya pelayanan publik bidang kesehatan

Masih adanya aduan masyarakat baik yang masuk melalui kanal aduan *offline* maupun *online* sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Responsivitas ini menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik. Pada Tahun 2024 terdapat 19 aduan yang masuk dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Pada Tahun 2025 terdapat 11 aduan masyarakat yang seluruhnya juga telah ditindaklanjuti.

- 2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
Terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam upaya mereformasi birokrasi yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam upaya perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi SAKIP hingga tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target nilai SAKIP yang ditetapkan. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 mencapai 82,46 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 83,86, pada tahun 2024 mencapai sebesar 84,00 dan di Tahun 2025 sebesar 84,15. Salah satu area perubahan birokrasi yang kapabel adalah sumber daya aparatur. Hal ini juga belum terwujud di Dinas Kesehatan oleh karena penempatan beberapa ASN di lingkungan Dinas Kesehatan masih berdasarkan kebutuhan organisasi yang disebabkan terbatasnya sumber daya kesehatan.
- 3) Tingginya angka kesakitan dan angka kematian;
Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian masih tinggi. Pada tahun 2022 angka kematian Ibu atau AKI mencapai angka 67,30; pada tahun 2023 mencapai angka 63,88 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan cukup banyak hingga mencapai angka 48,50 dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan kasus dan mencapai angka 38,11. Selain AKI, Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi faktor tingginya angka kesakitan dan angka kematian. Pada Tahun 2022 AKB mencapai angka 3,73; pada tahun 2023 mencapai angka 3,41; namun, pada tahun 2024 kasus AKB kembali meningkat hingga mencapai angka 7,46, akan tetapi pada tahun 2025 AKB kembali mengalami Penurunan hingga mencapai angka 6,73.
- 4) Masih adanya kasus kekurangan gizi;
Status gizi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi yang didasarkan pada berat badan dan tinggi badan anak. Hingga Tahun 2025 masih ada kasus kekurangan gizi. *Stunting* berdasarkan survei SSGI tahun 2022 masih berada pada angka 16,20; kemudian mengalami penurunan cukup banyak pada tahun 2023 mencapai angka 9,50; akan tetapi pada tahun 2024 kembali meningkat hingga mencapai angka 10%. Kenaikan angka stunting di tahun 2024 terjadi karena adanya perubahan perhitungan yaitu dengan menambahkan *severelly stunting*. Selain itu, kasus *wasting* juga masih ada Pada Tahun 2022 mencapai 4,04%; Tahun 2023 mencapai 3,93%; Tahun 2024 sebesar 4,04% dan pada tahun 2025 kasus *wasting* sebesar 2,87%.

5) Rendahnya budaya gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga disebabkan karena dari 249 desa/kelurahan baru sekitar 156 desa/kelurahan yang telah termasuk kedalam Desa/Kelurahan 5 Pilar STBM, dari 426.894 KK yang telah melaksanakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) sebanyak 339.859 KK (79,61%). KK yang telah melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Dimestik Rumah Tangga (PALDRT) sebanyak 317.692 (74,42%). Selain STBM, rendahnya budaya Germas juga disebabkan oleh masih rendahnya budaya aktifitas fisik di masyarakat yang masih sebatas aktifitas fisik ringan.

1.4 KEADAAN PEGAWAI DAN SARPRAS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia tersaji pada tabel 1.1 dan sarana dan prasarana sebagaimana tersaji pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
A Dinas Kesehatan Daerah										
1	SD	0	1	1	1	0	1	1	1	2
2	SMP Sederajat	8	0	8	0	0	0	8	0	8
3	SMA Sederajat	7	5	12	6	1	7	13	6	19
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D3	2	4	6	3	4	7	5	8	13
7	S1/D4	17	49	66	5	2	7	22	51	73
8	S2	9	7	16	0	0	0	9	7	16
9	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	43	66	109	15	7	22	58	73	131
B Puskesmas (27 Puskesmas)										
1	SD	0	1	1	2	3	5	2	4	6
2	SMP Sederajat	5	3	8	8	1	9	13	4	17
3	SMA Sederajat	39	38	77	18	12	30	57	50	107
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D3	74	531	605	12	106	118	86	637	723
7	S1/D4	81	443	524	26	83	109	107	526	633
8	S2	6	19	25	0	0	0	6	19	25
9	S3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Jumlah	205	1036	1241	66	205	271	271	1241	1512
C RSUD Sultan Fatah										
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	21	17	38	36	22	58	57	39	96
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D3	27	110	137	29	85	114	56	195	251
7	S1/D4	22	42	64	22	24	46	44	66	110
8	S2	9	12	21	13	7	20	22	19	41

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
9	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	79	181	260	100	138	238	179	319	498
D	RSUD Sunan Kalijaga									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	2	0	2	0	0	0	2	0	2
3	SMA Sederajat	66	50	116	20	23	43	86	73	159
4	D1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	D2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
6	D3	50	182	232	33	73	106	83	255	338
7	S1/D4	44	140	184	65	92	157	109	232	341
8	S2	15	12	27	16	20	36	31	32	63
9	S3	0	0	0			0	0	0	0
	Jumlah	177	385	562	135	208	343	312	593	905
E	Laboratorium Kesehatan									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	3	2	5	0	0	0	3	2	5
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D3	2	5	7	1	0	1	3	5	8
7	S1/D4	3	1	4	0	0	0	3	1	4
8	S2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
9	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	8	17	1	0	1	10	8	18
	TOTAL SDM	513	1676	2189	317	558	875	830	2234	3064

Dari jumlah pegawai sebanyak 3065 terdiri dari ASN sebanyak 2189 orang (71,44%) dengan jumlah Laki-laki 513 orang (16,74%) dan perempuan 1.676 orang (54,70%). Adapun pegawai Non ASN (Pegawai BLUD) sebanyak 875 orang (28,56%) dengan jumlah laki-laki sebanyak 317 orang (10,35%) dan perempuan sebanyak 558 orang (18,21%). Pegawai berstatus pendidikan dasar (SD-SMP derajat) sebanyak 35 orang (1,41%), pegawai berstatus SMA sebanyak 386 orang (12,60%) dan pegawai berstatus pendidikan Diploma D1 sejumlah 1 orang (0,03%), pegawai berstatus pendidikan Diploma D2 sejumlah 1 orang (0,03%), pegawai berstatus pendidikan Diploma D3 sejumlah 1.333 orang (43,51%), pegawai berstatus Sarjana atau strata sarjana (S1/D4) sejumlah 1.161 orang (37,89%), pegawai berstatus pasca sarjana (S2) sejumlah 146 orang (4,77%), dan pegawai berstatus pasca sarjana (S3) sejumlah 1 orang (0,03%). Kemudian dari total pegawai ASN berdasarkan pangkat golongan dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

	Golongan	L	P	Jumlah
A.	Dinas Kesehatan Daerah			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	3	4	7
3	Golongan III	12	22	34

	Golongan	L	P	Jumlah
4	Golongan IV	4	6	10
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	PPPK	11	26	37
6	PPPK PARUH WAKTU	13	8	21
	Jumlah ASN	43	66	109
7	NON ASN	15	7	22
	Jumlah Non ASN	15	7	22
	Jumlah Total	58	73	131
B.	Puskesmas (27 Puskesmas)			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	20	66	86
3	Golongan III	83	505	588
4	Golongan IV	21	96	117
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	PPPK	37	179	216
6	PPPK PARUH WAKTU	47	187	234
	Jumlah	208	1033	1241
7	NON ASN	66	206	272
	Jumlah Non ASN	66	206	272
	Jumlah Total	274	1239	1513
C.	Rumah Sakit Sultan Fatah			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	16	18
3	Golongan III	13	39	52
4	Golongan IV	12	22	34
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	PPPK	1	19	20
6	PPPK PARUH WAKTU	50	86	136
	Jumlah	78	182	260
7	NON ASN	100	138	238
	Jumlah Non ASN	100	138	238
	Jumlah Total	178	320	498
D.	Rumah Sakit Sunan Kalijaga			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	8	35	43
3	Golongan III	26	92	118
4	Golongan IV	26	47	73
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	PPPK	7	16	23
6	PPPK PARUH WAKTU	110	195	305
	Jumlah	177	385	562
7	NON ASN	135	208	343
	Jumlah Non ASN	135	208	343
	Jumlah Total	312	593	905
E.	Laboratorium Kesehatan			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0

	Golongan	L	P	Jumlah
2	Golongan II	0	0	0
3	Golongan III	2	3	5
4	Golongan IV	2	0	2
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	PPPK	2	3	5
6	PPPK PARUH WAKTU	3	2	5
	Jumlah	9	8	17
7	NON ASN	1	0	1
	Jumlah Non ASN	1	0	1
	Jumlah Total	10	8	18
	TOTAL SDM	832	2233	3065

Dinas Kesehatan Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Demak terlihat dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
1	Puskesmas Rawat Inap	15 Unit	15	0	0	0
2	Puskesmas Non Rawat Inap	12 Unit	12	0	0	0
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	52 Unit	32	0	8	12
4	Poskesdes	154 Unit	98	16	24	16
5	Posyandu	1309 Unit	1309	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah	2 Unit	2	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Swasta	4 Unit	4	0	0	0
8	Laboratorium kesehatan	2 Unit	2	0	0	0
9	Klinik Pratama	62 Unit	62	0	0	0
10	Klinik Utama	1 Unit	1	0	0	0
11	Ambulance	61 Unit	46	7	3	5
	<i>PSC 119</i>	3 Unit	1	1	1	0
	<i>Puskesmas</i>	51 Unit	41	4	2	4
	<i>RSUD Sultan Fatah</i>	2 Unit	2	0	0	0
	<i>RSUD Sunan Kalijaga</i>	5 Unit	2	2	0	1
12	Mobil Puskesmas Keliling	28 Unit	20	4	2	2
13	Motor Puskesmas Keliling	21 Unit	21	0	0	0
14	Mobil jenazah	5 Unit	3	1	1	0
	<i>PSC 119</i>	1 Unit	0	0	1	0
	<i>Puskesmas</i>	1 Unit	0	1	0	0
	<i>RSUD Sultan Fatah</i>	1 Unit	1	0	0	0
	<i>RSUD Sunan Kalijaga</i>	2 Unit	2	0	0	0
15	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian	186 Unit	186	0	0	0
	<i>Industri Farmasi</i>	1 Unit	1	0	0	0
	<i>Pedagang Besar Farmasi</i>	3 Unit	3	0	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
	Apotek (BUMD)	8 Unit	8	0	0	0
	Apotek(Swasta),	157 Unit	157	0	0	0
	Toko Obat,	2 Unit	2	0	0	0
	Optikal,	14 Unit	14	0	0	0
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Unit	1	0	0	0



Gambar 1. 2 Sarana Prasarana Kesehatan

1.5 KEUANGAN

Pada Tahun 2025 terdapat 3 indikator sasaran, 1 program penunjang, dan 4 program urusan pemerintahan wajib, 21 kegiatan, dan 90 sub kegiatan yang harus dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 607.525.465.986,84 dengan Realisasi sebesar Rp. 575.004.529.642,20 atau sebesar 94,65%.

Dinas Kesehatan Daerah memiliki beberapa Aset, Jumlah Aset yang dimiliki Bidang Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2025 (hasil unduhan laporan dari SIPD per tanggal 27 Januari 2026) sebesar Rp. 666.054.896.018,49. Aset tersebut terdiri dari aset lancar, aset tetap serta aset lainnya.

1. Aset lancar :

Aset lancar Bidang Kesehatan tercatat sebesar Rp. 80.998.457.057,77:

- 1) Kas dan Setara Kas sebesar sebesar Rp. 36.503.936.762,97
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.1.735.000,00
 - 3) Kas di BLUD sebesar Rp.36.417.719.910,97
 - 4) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp. 84.481.852,00
 - 5) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.1.149.562.441,00
 - 6) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 25.132.932.991,00
 - 7) Penyisihan Piutang sebesar Rp. (2.836.335.918,83)
 - 8) Persediaan sebesar Rp.21.048.360.781,63
2. Aset Tetap :
- Aset tetap Bidang Kesehatan tercatat sebesar Rp. 584.002.651.436,72
- 1) Tanah sebesar Rp.18.230.034.000,00
 - 2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 499.701.207.794,58
 - 3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 446.954.303.371,46
 - 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 40.048.897.949,65
 - 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 107.510.054,00
 - 6) Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 22.165.000,00
 - 7) Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. (421.061.466.732,97)
3. Aset lainnya :
- Aset lain Bidang Kesehatan tercatat sebesar Rp. 885.462.024,00
- 1) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 2.888.460.746,00
 - 2) Aset Lain-lain sebesar Rp. 99.995.000,00
 - 3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. (2.102.993.722,00)

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan;
 Pada bagian ini memuat Gambaran umum organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Keadaan Pegawai dan Sarpras, Keuangan, dan Sistematika Laporan.
- Bab II Perencanaa Kinerja;
 Pada bagian ini memuat Perencanaan Strategis, IKU, RKT, Kebijakan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Anggaran per Sasaran Kinerja Strategis.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja;
 Pada bagian ini memuat Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Kinerja Sasaran Strategis, Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya, dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup;

Pada bagian ini memuat Tinjauan Umum Capaian Kinerja, dan Strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Lampiran Memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Prestasi, serta dokumentasi kegiatan dalam mendukung tujuan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah disusun. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak merupakan sebuah komitmen dalam mendukung visi dan misi pemerintah kabupaten Demak.

2.1.1. Visi Dan Misi Kabupaten Demak

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni “Bermartabat, Maju, Sejahtera”. Dinas Kesehatan Daerah sebagai pengampu urusan bidang kesehatan mendukung visi bupati yaitu Sejahtera. Adapun filosofi dan penjabaran makna pokok visi Sejahtera yaitu menekankan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Seluruh lapisan masyarakat berhak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi, serta dapat menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan layak.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Kesehatan Daerah mendukung misi bupati yang pertama yaitu :

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing dan Berakhlak

Misi ini dilaksanakan terutama untuk mewujudkan pokok visi “Semakin Bermartabat”. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing dimaknai dengan kualitas yang sehat, cerdas, produktivitas tinggi, dan berwawasan luas. Sumber daya manusia yang berakhlak diwujudkan melalui pembangunan kualitas karakter manusia yang religius dan berbudaya.

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Perwujudan masyarakat yang “Semakin Bermartabat” diupayakan pula melalui keteladanan kepemimpinan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas akan melahirkan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dinas Kesehatan Daerah secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan misi pertama yaitu pada tujuan Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berakhlak dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator yang diacu Dinas Kesehatan Daerah adalah Usia Harapan Hidup.

Dalam RPJMD terdapat rumusan Tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD tahun 2025-2029. Dinas Kesehatan Daerah mendukung tujuan pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter. Dalam rangka memaksimalkan Pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup.

2.1.2. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kesehatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Kesehatan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target
3.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup
		Sasaran 1. Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)
			Angka Kematian Ibu (AKI)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya
		Sasaran 3. Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri

2.1.3. Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan

Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten demak pada tahun 2025 dilaksanakan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN YANG DITINDAKLANJUTI
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Sasaran 1. MENURUNYA ANGKA KEMATIAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sasaran 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN BERKOMPETENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes Mendapat Rekomendasi Ijin Praktik
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SERTA SARANA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI KETENTUAN
	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
Sasaran 3. MENINGKATNYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS (BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat
	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Mandiri
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki sembilan indikator. Pada Tahun 2025 terjadi perubahan target pada beberapa Indikator IKU, perubahan target ini berdasarkan dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang mengalami perubahan target yaitu pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang semula memiliki target 90,00 berubah menjadi 91,50. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang semula memiliki target 75,62 berubah menjadi 75,91. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) yang semula memiliki target 3,14 Per 1000KLH berubah menjadi 7,25 Per 1000KLH. Indikator Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri yang semula memiliki target sebesar 84,70% berubah menjadi 100%. Untuk rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka	Untuk memperoleh nilai IKM, maka digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $IKM = (Total\ Persepsi\ per\ unsur : Total\ unsur\ yang\ terisi) \times Nilai\ penimbang$	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Daerah	Angka	Sekretaris
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Perhitungan angka harapan hidup sangat bergantung pada data kematian dalam tabel kematian dan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam metode <i>life table</i>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Tahun	Sekretaris
		Sasaran 1. Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun pada satu tahun tertentu, dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah	Angka	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah	Angka	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dikali 100	Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Daerah	%	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan Kepala bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)
		Sasaran 3. Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.	Jumlah Desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa dalam satu tahun tertentu dikali 100	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah	%	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam Menjabarkan lebih lanjut sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten demak menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN	100%	215.624.023.500
				1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1 Laporan	10.000.000
				1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000
				1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	35.000.000
				1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000
				1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.000.000
				1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	660.415.800
				1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan	11 Paket	10.000.000
				1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	8 Paket	171.760.200
				1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	12.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	64.044.400
				1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	53.781.200
				1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.000.000
				1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000
				1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	286.830.000
				1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30 Dokumen	20.000.000
				1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	25 Unit	810.908.200
				1.02.01.02.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	25.000.000
				1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	642.234.600
				1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	118.673.600
				1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000
				1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.894.691.300

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000
				1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	1.841.691.300
				1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	48.000.000
				1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	44 Unit	358.990.000
				1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000
				1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	123.720.000
				1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	3 Unit	5.000.000
				1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	50.270.000
				1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000
				1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	75.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	30.000.000
				1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	29 Fasyankes	211.854.018.200
				1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	211.854.018.200
2.	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang Mencapai Target	100%	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%	130.351.361.428
				1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun	7 Dokumen	290.000.000
				1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	125.000.000
				1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000
				1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000
				1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	125.000.000
				1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	130.061.361.428

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				01.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	2360 Orang/Bulan	120.189.936.428
				1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	9.756.425.000
				1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	0 Dokumen	40.000.000
				1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	1 Laporan	75.000.000
3	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,8 Per 1000 kelahiran hidup	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	112.583.871.860
		Angka Kematian Ibu (AKI)	96 Per 100.000 kelahiran hidup	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk)	2,4 Per 100.000 penduduk	21.371.726.010
				1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.250.000.000
				1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	2 Unit	3.000.000.000
				1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	500.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.02.2.01.0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	2 Unit	4.000.000.000
				1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	3 unit	255.000.000
				1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	7 Unit	4.366.726.010
				1.02.02.2.01.0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	1 Paket	6.500.000.000
				1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Bahan Habis	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1 Paket	500.000.000
				1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	100%	90.037.145.850
				1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22400 Orang	2.699.795.800
				1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21300 Orang	1.323.158.900
				1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20600 Orang	1.191.904.700
				1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78900 Orang	1.927.990.400
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179718 Orang	1.493.001.500

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	778298 Orang	4.000.000.000
				1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129000 Orang	598.472.500
				1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313601 Orang	250.000.000
				1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.762 Orang	106.300.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2811 Orang	295.780.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga tuberkulosis mendapat Pelayanan TBC sesuai standar	10345 Orang	1.623.951.000
				1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	25.199 Orang	745.750.000
				1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	6.327.819.900
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	5.372.160.900
				1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	1.045.554.200

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	4.067.940.400
				1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	3.216.932.750
				1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	1 Puskesmas	50.000.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	167.625.000
				1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza	27 Orang	234.650.000
				1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	500.000.000
				1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	8.625.709.850
				1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	35.774.258.900
				1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	80 Paket	70.000.000
				1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	29 Unit	580.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	1.478.532.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	764.748.650
				1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	4.000.000.000
				1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29 Unit	500.000.000
				1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	30.000.000
				1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	265.000.000
				1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	300.000.000
				1.02.02.2.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	388.266 Keluarga	120.000.000
				1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1700 Orang	50.000.000
				1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65 Orang	50.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	40.108.500
				1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan	150.000.000
				1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik	1 Aplikasi Sistem	750.000.000
				1.02.02.2.03.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000
				1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000
				1.02.02.2.03.0003	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit	300.000.000
				1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional	4 Rumah Sakit	425.000.000
				1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Unit	350.000.000
				1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	75.000.000
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya	93,10%	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN BERKOMPETENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100%	2.028.880.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.03.02. 01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase nakes mendapat rekomendasi ijin praktik	100%	175.000.000
				1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000
				1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	100.000.000
				1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	1 Dokumen	1.338.880.000
				1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	96.880.000
				1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	900 orang	742.000.000
				1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000
				1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis	100%	515.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.02.03.2.03.001	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>	350 Orang	515.000.000
				1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SERTA SARANA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI KETENTUAN	100%	400.000.000
				1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	150.000.000
				1.02.04.2.01.0001	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	45 Dokumen	150.000.000
				01.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT	100%	250.000.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				01.02.04.2.03.0001	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	100 Dokumen	250.000.000
5	Meningkatnya Gerakan Masyarakat hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	46,50%	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS (BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)	80%	2.182.647.050
				1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	337.000 Rumah Tangga	298.980.000
				1.02.05.2.02.0001	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	2 Dokumen	298.980.000
				1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu mandiri	46,50%	1.883.667.050
				1.02.05.2.03.0001	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	2 Dokumen	1.883.667.050

2.4. Kebijakan

Kebijakan Dinas Kesehatan Daerah yang diambil dalam upaya menyelesaikan Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Kebijakan Strategis yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2025

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Penurunan AKI, AKB diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONED, RS PONEK, serta penyediaan RTK	a. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak b. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak c. Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2024 Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Di Daerah	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi Pelaksanaan SPM di Puskesmas maupun RS sebagai fasyankes rujukan.
2.	Pelayanan kesehatan balita di prioritaskan pada pelayanan deteksi dini tumbuh kembang balita, PAUD, KB	a. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Demak. c. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan Pembentukan Tim Rujukan Eksternal di Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak
3.	Peningkatan ASI Eksklusif diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan dan penyediaan sarpras pojok laktasi, Peningkatan status gizi balita diprioritaskan pada deteksi dini tumbang dan perwujudan keluarga sadar gizi (kadarsi)	a. Peraturan Bupati No. 29 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021 b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah	Memberikan kepastian dan landasan hukum dalam upaya pencegahan masalah gizi

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c. Surat Edaran No. 21 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan dan Desa	
4.	Pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan pada perwujudan akreditasi puskesmas dengan Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar serta penyediaan obat dan perbekes diprioritaskan pada penggunaan obat yang rasional	SK Bupati Demak No. 440/357 tahun 2021 tentang Penetapan tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.5. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui **Perjanjian Kinerja**, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak pada

Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6
Indikator Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
					RKPD	RKPD-P
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	91,50
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah	Angka	85,13	85,13
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target	%	100	100
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	3,14	7,25
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	63,50	63,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	100	100
		Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	84,70	100

Pada Tahun 2025 Kepala Dinas Kesehatan Daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja sebanyak dua kali yaitu perjanjian kinerja murni dan perjanjian kinerja perubahan.

Adapun definisi operasional dan formulasi indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2. 7
Definisi Operasional dan Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi penghitungan
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pemberian informasi terhadap jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan yang telah dilakukan tindak lanjut	Jumlah pemberian informasi dibagi Jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan dikali 100
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan.	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target dibagi jumlah indikator sasaran yang ditetapkan dikali 100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun pada satu tahun tertentu, dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 1.000
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 100.000
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya	fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dikali 100
6	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.	Jumlah Desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa dalam satu tahun tertentu dikali 100

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun Anggaran 2025, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak melaksanakan 5 program (1 program urusan penunjang dan 4 program urusan wajib) dengan 21 kegiatan dengan 90 sub kegiatan dengan didukung oleh 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 27 puskesmas, 1 Labkes dan 2 RSUD (RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah), masing masing UPTD di berikan Kuasa pengguna anggaran sehingga proses perencanaan dan realisasi anggaran dilaksanakan langsung oleh UPTD. Pada Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sejumlah Rp. 583.178.493.310,00

pada perubahan anggaran mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 20.943.354.676,84 sehingga menjadi Rp. 604.121.847.986,84 kemudian Dinas Kesehatan Daerah mendapatkan tambahan dari anggaran Insentif Fiskal sebesar Rp. 3.403.618.000,00 sehingga menjadi Rp. 607.525.465.986,84. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 575.004.529.642,20 atau sebesar 94,65%.

2.6. Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

Adapun besaran anggaran Dinas Kesehatan Daerah yang direncanakan dari setiap Sasaran, program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8
Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	604.121.847.986,84	607.525.465.986,84	3.403.618.000,00	0,56
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	604.121.847.986,84	607.525.465.986,84	3.403.618.000,00	0,56
1	MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	471.147.974.107,34	471.147.974.107,34	0,00	0,00
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.770.500,00	398.770.500,00	0,00	0,00
1.1.1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.583.500,00	287.583.500,00	0,00	0,00
1.1.2.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.187.000,00	61.187.000,00	0,00	0,00
1.2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.536.407.045,00	143.536.407.045,00	0,00	0,00
1.2.1.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	136.702.944.545,00	136.702.944.545,00	0,00	0,00
1.2.2.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.486.812.500,00	6.486.812.500,00	0,00	0,00
1.2.3.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	346.650.000,00	346.650.000,00	0,00	0,00
1.4.	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
1.4.1.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00
1.5.1.		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.5.2.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
1.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.964.900,00	543.964.900,00	0,00	0,00
1.6.1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.6.2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.832.200,00	93.832.200,00	0,00	0,00
1.6.3.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.060.600,00	24.060.600,00	0,00	0,00
1.6.4.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.750.900,00	119.750.900,00	0,00	0,00
1.6.5.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.781.200,00	43.781.200,00	0,00	0,00
1.6.6.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.6.7.		Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.6.8.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.540.000,00	180.540.000,00	0,00	0,00
1.6.9.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.7.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.358.100,00	383.358.100,00	0,00	0,00
1.7.2.		Pengadaan Mebel	36.773.600,00	36.773.600,00	0,00	0,00
1.7.3.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.444.900,00	229.444.900,00	0,00	0,00
1.7.4.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.139.600,00	92.139.600,00	0,00	0,00
1.7.5.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.8.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.548.000,00	2.738.548.000,00	0,00	0,00
1.8.1.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.8.2.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2.535.007.319,00	2.535.007.319,00	0,00	0,00
1.8.3.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.540.681,00	198.540.681,00	0,00	0,00
1.9.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
1.9.1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.9.2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.680.000,00	113.680.000,00	0,00	0,00
1.9.3.		Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.9.4.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.270.000,00	50.270.000,00	0,00	0,00
1.9.5.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.9.6.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.9.7.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	322.707.975.562,34	322.707.975.562,34	0,00	0,00
1.10.1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	322.707.975.562,34	322.707.975.562,34	0,00	0,00
2.	MENURUNYA ANGKA KEMATIAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.712.815.779,50	133.116.433.779,50	3.403.618.000,00	2,62
2.1.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.706.890.492,00	40.306.890.492,00	1.600.000.000,00	4,13
2.1.1.		Pengembangan Puskesmas	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.766.196.000,00	19.366.196.000,00	600.000.000,00	3,20
2.1.5.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.784.869.492,00	9.784.869.492,00	1.000.000.000,00	11,38
2.1.6.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	355.825.000,00	355.825.000,00	0,00	0,00
2.2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.344.455.179,50	92.148.073.179,50	1.803.618.000,00	2,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
2.2.1.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.471.426.000,00	2.471.426.000,00	0,00	0,00
2.2.2.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.2.3.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	294.981.600,00	294.981.600,00	0,00	0,00
2.2.4.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.2.5.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.252.946.000,00	1.252.946.000,00	0,00	0,00
2.2.6.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	753.378.100,00	753.378.100,00	0,00	0,00
2.2.7.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00
2.2.8.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.2.9.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
2.2.10.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	348.550.000,00	348.550.000,00	0,00	0,00
2.2.11.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.311.790.000,00	1.311.790.000,00	0,00	0,00
2.2.12.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	0,00
2.2.13.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
2.2.14.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.930.720.200,00	6.580.720.200,00	650.000.000,00	10,96
2.2.15.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	252.584.600,00	252.584.600,00	0,00	0,00
2.2.16.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	763.050.300,00	763.050.300,00	0,00	0,00
2.2.17.		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	399.458.400,00	399.458.400,00	0,00	0,00
2.2.18.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.2.19.		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	542.172.000,00	542.172.000,00	0,00	0,00
2.2.20.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.975.400,00	15.975.400,00	0,00	0,00
2.2.21.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	85.730.000,00	85.730.000,00		
2.2.22.		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.644.238.000,00	3.644.238.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
2.2.23.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.783.992.179,50	62.937.610.179,50	1.153.618.000,00	1,87
2.2.24.		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
2.2.25.		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	329.251.400,00	329.251.400,00	0,00	0,00
2.2.26.		Operasional Pelayanan Puskesmas	4.558.881.000,00	4.558.881.000,00	0,00	0,00
2.2.27.		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	519.981.000,00	519.981.000,00	0,00	0,00
2.2.28.		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	314.719.000,00	314.719.000,00	0,00	0,00
2.2.29.		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00
2.2.30.		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	56.539.000,00	56.539.000,00	0,00	0,00
2.2.31.		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	358.242.000,00	358.242.000,00	0,00	0,00
2.2.32.		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	86.750.000,00	86.750.000,00	0,00	0,00
2.2.33.		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00
2.2.34.		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00
2.2.35.		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.2.36.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	622.459.000,00	622.459.000,00	0,00	0,00
2.2.37.		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.157.560.000,00	1.157.560.000,00	0,00	0,00
2.2.38.		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	301.500.000,00	301.500.000,00		
2.2.39.		Pengelolaan Layanan Imunisasi	507.330.000,00	507.330.000,00		
2.3.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	452.268.108,00	452.268.108,00	0,00	0,00
2.3.1.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	452.268.108,00	452.268.108,00	0,00	0,00
2.4.		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	209.202.000,00	209.202.000,00	0,00	0,00
2.4.1.		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	101.091.000,00	101.091.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
2.4.2.		<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	108.111.000,00	108.111.000,00	0,00	0,00
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.591.791.000,00	1.591.791.000,00	0,00	0,00
3.1.		<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1.		<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2.		<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.2.		<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	352.624.000,00	352.624.000,00	0,00	0,00
3.2.1.		<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2.		<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3.		<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	252.624.000,00	252.624.000,00	0,00	0,00
3.3.		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.174.167.000,00	1.174.167.000,00	0,00	0,00
3.3.1.		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.174.167.000,00	1.174.167.000,00	0,00	0,00
4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	632.302.000,00	632.302.000,00	0,00	0,00
4.1		<i>Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	60.063.000,00	60.063.000,00	0,00	0,00
4.1.1.		<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	60.063.000,00	60.063.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
4.2.		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	572.239.000,00	572.239.000,00	0,00	0,00
4.2.1.		<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	572.239.000,00	572.239.000,00	0,00	0,00
5.	MENINGKATNYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.036.965.100,00	1.036.965.100,00	0,00	0,00
5.1.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	411.700.100,00	411.700.100,00	0,00	0,00
5.1.1.		<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	411.700.100,00	411.700.100,00	0,00	0,00
5.2.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1		<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00
5.3.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	516.765.000,00	516.765.000,00	0,00	0,00
5.3.1		<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	516.765.000,00	516.765.000,00	0,00	0,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Telah melaksanakan penilaian kinerja dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu:

1. Pada indikator Positif, Semakin tinggi realisasi dibandingkan target menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus perhitungan berikut :

$$\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Pada Indikator negatif, Semakin rendah realisasi dibandingkan target maka menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.1 ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, 2024 terhadap Target Akhir Renstra Th.2026

Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah 2021-2026, guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Tahun 2025, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada tabel 3.2 :

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Capaian 2025	% Capaian 2024	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Th.2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 2025
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	91,5	91,52	100,02	100,02	101,69	Sangat Tinggi
1.1. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	100	100	Sangat Tinggi
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,13	84,15	98,85	99,14	98,21	Sangat Tinggi
2.1. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	88,89	88,89	87,5	88,89	Tinggi
3. Angka Harapan Hidup	75,91	76,08	100,22	100,24	100,56	Sangat Tinggi
3.1. Angka Kematian Bayi (AKB)	7,25	6,73	107,17	-18,77	56,81	Sangat Tinggi
3.2. Angka Kematian Ibu (AKI)	63,5	38,11	139,99	123,74	159,89	Sangat Tinggi
3.3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	100	100	100,00	100	107,41	Sangat Tinggi
3.4. Persentase Desa Siaga aktif mandiri	100	100	100,00	118,57	212,77	Sangat Tinggi
Rata - rata capaian			103,90	90,05	114,03	Sangat Tinggi
Selisih tahun 2025 dengan 2024 dan Target Akhir Renstra Th.2026				-13,86	23,98	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025, dari 9 indikator kinerja Dinas Kesehatan Daerah yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 terlihat bahwa 7 dari 9 indikator kinerja telah memenuhi target kinerja tahun 2025. 2 indikator yang tidak memenuhi target kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi nilai SAKIP 84,15 dari target 85,13 (% capaian : 98,85%), Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target 88,89 dari target 100 (% Capaian: 88,89). Dari 9 indikator kinerja Dinas Kesehatan Daerah rata-rata capaiannya adalah 103,90%. Pencapaian kinerja masing masing indikator tergambar pada uraian berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Untuk memperoleh nilai IKM, maka digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Tidak optimalnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat. Ruang lingkup Survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 yakni:

1. Kesesuaian Persyaratan Dengan Jenis Layanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Ketepatan Waktu Pelayanan
4. Kejelasan / Kesesuaian Biaya Pelayanan
5. Kepastian Produk Layanan
6. Kemampuan Kompetensi Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Pelayanan
9. Sarana Prasarana Unit Pelayanan.

Pada Tahun 2025 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,73	90,54	91,02	91,50	91,52	100,02	90,00	107,00

Sumber : Dinkesda Kab. Demak 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 dari data realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat menunjukkan angka 91,52. Angka ini lebih besar dari nilai target sebesar 91,50 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,02%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai lebih dari target kinerja akhir Renstra dengan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 107,00%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capaian tahun 2022 sebesar 90,73, pada tahun 2023 sebesar 90,54%, pada tahun 2024 sebesar 91,02. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kembali meningkat pada tahun 2024 dan 2025 serta telah mencapai target akhir Renstra 2026.

Penilaian IKM ini berdasarkan dari hasil survey yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun (semester 1 dan semester 2). Hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah adalah 91,52 dengan predikat kinerja sangat baik. Adapun rincian penilaian IKM berdasarkan dari unsur-unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Rincian Penilaian IKM berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai	Nilai Rata-Rata Per Unsur	NRR tertimbang per unsur	IKM Unit Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	366	3,813	0,419	95,313	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	361	3,760	0,414	94,010	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	339	3,531	0,388	88,281	Baik

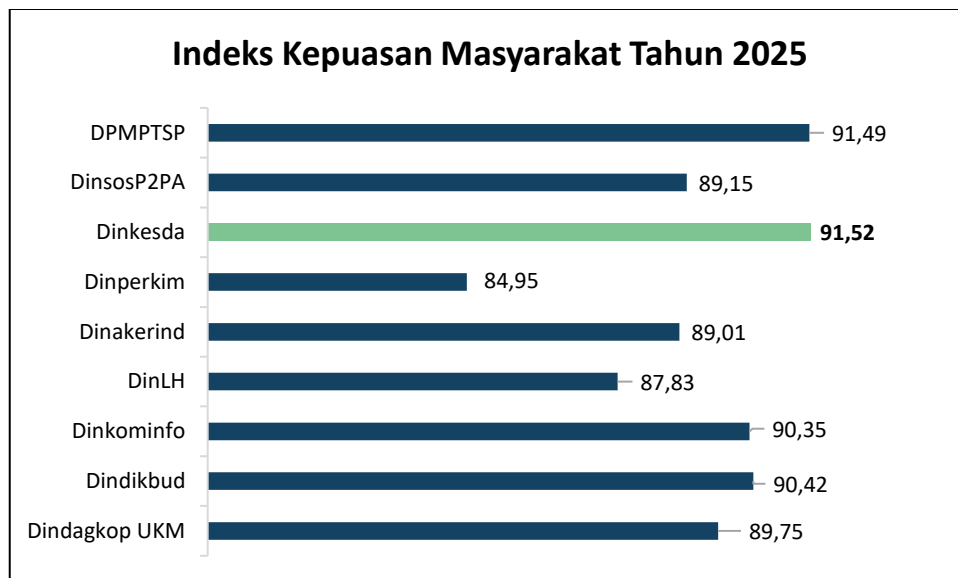
No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai	Nilai Rata-Rata Per Unsur	NRR tertimbang per unsur	IKM Unit Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan
4	Kejelasan/ Kewajaran Biaya Pelayanan	374	3,896	0,429	97,396	Sangat Baik
5	Kepastian/ Kesesuaian Produk Layanan	356	3,708	0,408	92,708	Sangat Baik
6	Kemampuan Kompetensi Petugas Pelayanan	336	3,500	0,385	87,500	Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	373	4,885	0,427	97,135	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	335	3,490	0,384	87,240	Baik
9	Kepastian Adanya Sarana dan Prasarana	355	3,698	0,407	92,448	Sangat Baik
Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur = 3,661						
Nilai Konversi SKM = 91,52						
Kategori Mutu Pelayanan = SANGAT BAIK						

Berdasarkan Data tabel diatas Meskipun capain IKM masuk kategori capaian sangat tinggi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak akan melakukan upaya tindak lanjut untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. atas beberapa unsur dengan nilai rata-rata terendah diantaranya :

1. Unsur layanan yang memiliki nilai rata-rata terendah di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dan Kepastian / Kesesuaian Produk Layanan, dengan nilai rata-rata 3,646. Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah penambahan media atau informasi terkait dengan persyaratan pelayanan dan produk layanan;
2. Unsur Kemampuan Kompetensi Petugas Pelayanan juga termasuk dalam nilai rata-rata terendah semester 2 IKM Dinas Kesehatan Daerah, akan ditindaklanjuti dengan mengikutsertakan pegawai atau petugas untuk mengikuti bintek / diklat yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang akhirnya berdampak pada peningkatan pemahaman dan profesionalisme pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak selaku unit penyelenggara pelayanan publik.

Capaian Kinerja pada Indikator tersebut bila dibandingkan dengan capaian beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Demak. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa realisasi Dinas Kesehatan Daerah kabupaten demak termasuk tinggi dibandingkan Realisasi beberapa perangkat Daerah.

Grafik 3. 1
Perbandingan IKM Dinkesda dengan OPD Lain



Bag. Organisasi Setda 2025, data diolah

- a) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja IKM Dinas Kesehatan Daerah
- Faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan IKM Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Dukungan dan Komitmen dari para pimpinan melalui kebijakan yang berorientasi pada kemudahan pelayanan;
 2. Kualitas Petugas (SDM) yang memiliki dedikasi, ketrampilan dan sikap pelayanan yang ramah;
 3. Didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.
- b) Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam kinerja IKM di Dinas Kesehatan Daerah.
1. Unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat bahwa laporan-laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sudah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk menindaklanjuti hal ini laporan pengaduan beserta dengan laporan tindak lanjut pengaduan yang masuk ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak akan di publikasikan melalui media sosial atau website resmi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, Sehingga seluruh masyarakat dapat melihat laporan tersebut.
 2. Unsur Kompetensi petugas pelayanan akan ditindaklanjuti dengan melakukan orientasi atau sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dan juga bekerjasama dengan instansi lain yaitu dengan Universitas untuk memberikan

sosialisasi terkait dengan peningkatan pendidikan Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya pemahaman responden tentang SOP pelayanan yang dirasa tidak sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam memberikan penilaian, dan kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan tanpa bertanya kepada petugas yang bertanggungjawab terhadap penyebaran kuesioner. Selain itu, Minimnya SDM menyebabkan kurangnya pemberian penjelasan tentang kuesioner kepada responden yang mengalami kesulitan dalam mengisi kuesionernya.

c) Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja IKM Dinas Kesehatan Daerah

1. Unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak melakukan publikasi laporan pengaduan masyarakat beserta dengan laporan tindak lanjutnya ke website resmi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dengan laman <https://dinkes.demakkab.go.id/>. Melalui publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Selain itu dengan publikasi juga mampu memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan internal bagi suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Unsur Kompetensi petugas pelayanan. Bekerjasama dengan Universitas-universitas untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak serta melakukan Orientasi Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan dengan Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Indikator sasaran kinerja dari Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.

a. Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.

Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Jumlah pemberian informasi terhadap jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan yang telah dilakukan tindak lanjut. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Keluhan yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Pemberian Informasi}}{\text{Jumlah Permintaan Klarifikasi, Konfirmasi Atau Pengaduan}} \times 100$$

Masih adanya aduan masyarakat, baik aduan *offline* maupun *online* sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

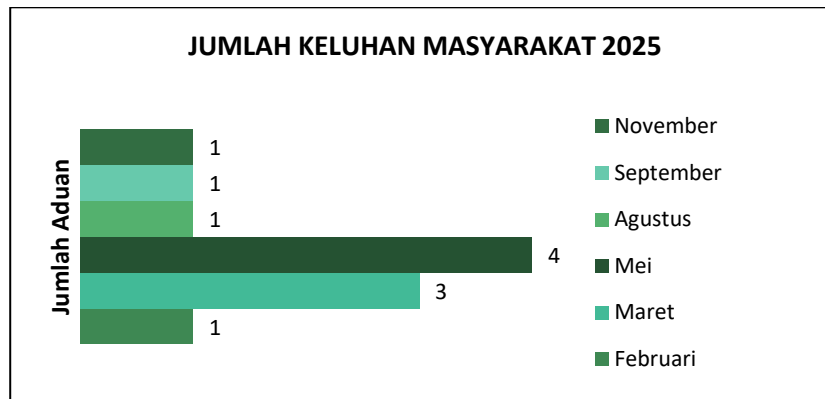
Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkesda Kab. Demak 2025

Pada tahun 2025 ada 11 keluhan masyarakat yang masuk ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dan sudah selesai ditindaklanjuti. Sehingga dari data tersebut realisasi nilai Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan angka 100%, sama dengan nilai target tahun 2025 sebesar 100%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% sama dengan persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% dan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai Target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti masuk ke dalam kategori capaian sangat tinggi. Responsivitas menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik. Masih adanya aduan dari masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Grafik 3. 2
Keluhan Masyarakat Tahun 2025



Sumber : Dinkesda Kab. Demak 2025

Pengaduan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Daerah merupakan aduan masyarakat yang masuk melalui kanal aduan yaitu Media sosial, *Help Desk*, Buku Register, dan Lapor SP4N. Total aduan yang masuk ke Dinas Kesehatan Daerah sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 11 aduan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian jumlah keluhan masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

- a) Faktor-faktor pendukung Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 1. Sistem pengaduan yang jelas dan mudah diakses baik secara *online* ataupun *offline*;
 2. Dukungan Teknologi Informasi;
 3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat.
- b) Faktor-Faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pencapaian indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sarana pengaduan yang tersedia baik secara *online* maupun *offline*;
 2. Masyarakat masih kesulitan dalam memahami tata cara pengaduan secara langsung maupun elektronik.
- c) Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terkait kanal aduan masyarakat baik *online* maupun *offline*.
 2. Menugaskan admin atau petugas yang berkompeten dan memiliki pemahaman tentang ketentuan dan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP adalah Perolehan nilai dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat daerah yang dilakukan oleh evaluator rewiu SAKIP Internal yaitu dari Inspektorat Daerah. Terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam upaya mereformasi birokrasi yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dalam upaya perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi SAKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian dari beberapa komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja dalam mengimplementasikan SAKIP.

Gambar 3. 1
Komponen-komponen Penilaian AKIP



Sumber : LHE SAKIP Inspektorat 2024 dinilai 2025

Masing-masing komponen dalam penilaian SAKIP ini memiliki bobot total tertentu terhadap nilai akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, misalnya perencanaan dan pengukuran kinerja yang masing-masing berbobot 30%, pelaporan kinerja 15%, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%, sehingga jika dijumlahkan menghasilkan bobot maksimal 100 sebagai nilai akhir akuntabilitas.

Pada tahun 2025 nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan angka 84,15. Nilai SAKIP 2025 masih belum mencapai target kinerja 2025 yang memiliki target sebesar 85,13. Meskipun begitu, nilai SAKIP tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tahun 2024 sebesar 84,00.

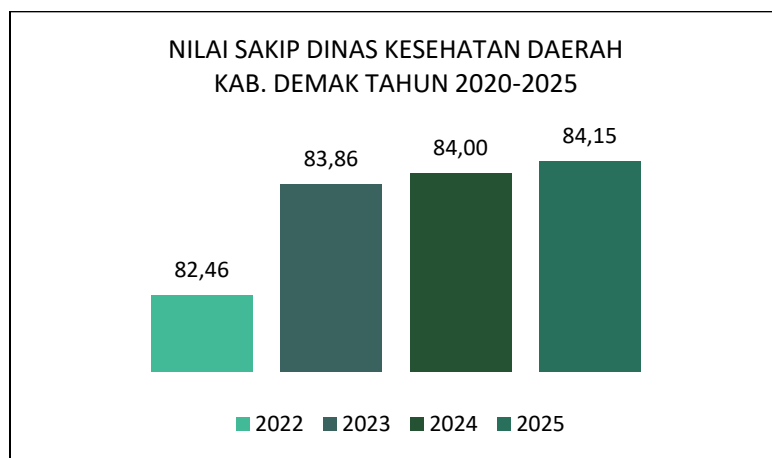
Tabel 3. 6
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinkes Kab. Demak Tahun 2025
dengan Tahun-Tahun sebelumnya

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,46	83,86	84,00	85,13	84,15	98,85	85,53	98,39

Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,85% lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,39% dan masih belum mencapai target akhir Renstra tahun 2026 dengan persentase capaian terhadap target akhir renstra 2026 sebesar 98,39%. Meskipun demikian, Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah masuk kedalam Kategori A. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak kecenderungan mengalami kenaikan, Hasil Nilai SAKIP dapat dilihat pada grafik Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2022-2024 berikut ini :

Grafik 3. 3
Nilai SAKIP Dinkesda Tahun 2022-2024



Sumber : Dinkesda Kab. Demak 2025

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah tahun 2025 pada tiap komponen penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

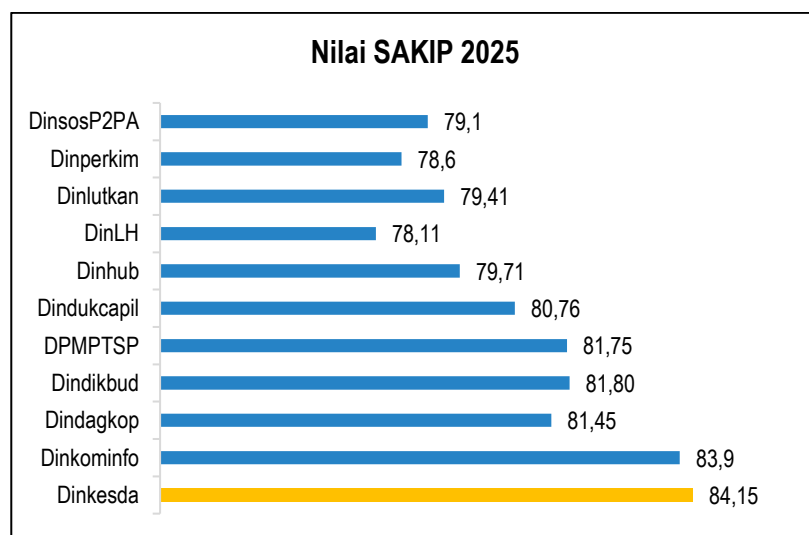
Gambar 3. 2
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Pada Komponen Perencanaan memiliki bobot total 30% Dinas Kesehatan Daerah mendapatkan nilai sebesar 26,70%. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot total 30% mendapatka nilai sebesar 22,50%. Komponen Pelaporan Kinerja dengan total bobot 15% mendapatkan nilai sebesar 12,45%, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25% mendapatkan nilai sebesar 22,50%. Sehingga nilai total SAKIP Dinas Kesehatan Daerah tahun 2025 adalah 84,15.

Apabila dibandingkan dengan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah kabupaten Demak dengan Nilai SAKIP pada beberapa OPD di kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mendapatkan Nilai SAKIP tertinggi kategori non Inspektorat Daerah pada tahun 2025. Perbandingan Nilai tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3. 4
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025



Sumber : LHE SAKIP 2025

a) Faktor-Faktor Pendorong dalam keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah

1. Peningkatkan Kualitas Laporan Kinerja dengan analisis mendalam terkait sasaran kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra, tren realisasi tahunan sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Implementasi E-SAKIP dengan optimal dalam pelaporan kinerja triwulanan dan tahunan;
3. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
4. Peningkatan Monitoring dan evaluasi serta memastikan rekomendasi hasil dari evaluasi ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
5. Penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja, cascading, pohon kinerja, dan crosscutting yang dapat mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan.

b) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang tertuang dalam LHE SAKIP Nomor 700/016/wil1/evaluasi/2025 ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam input data pada aplikasi E-SAKIP masih dijumpai kondisi tidak seluruh target dan capaian realisasi kinerja pada aplikasi tersebut sesuai dengan data laporan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Penetapan target kinerja Dinas Kesehatan Daerah yang dituangkan dalam perjanjian kinerja eselon 2 masih sama dengan Realisasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya;
3. Dalam Penetapan IKU masih mencantumkan indikator Kinerja yang seharusnya masuk Indikator Penunjang yaitu persentase indikator sasaran Strategis yang mencapai target.
4. Penyusunan Laporan Kinerja tidak dilengkapi dengan bukti telah dilakukan review berjenjang dari tim penyusun sampai dengan kepada kepala perangkat Daerah.

c) Rekomendasi Perbaikan capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah

Dalam permasalahan tersebut terdapat rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP Nomor 700/016/wil1/evaluasi/2025 sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tim Penyusun LKjIP untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-SAKIP yang diakses pada lama <https://esakip.demakkb.go.id//> dengan melakukan

perbaikan seluruh target dan capaian realisasi kinerja pada aplikasi tersebut sesuai dengan data capaian Dinkesda yang sesungguhnya;

2. Merumuskan penetapan target Kinerja OPD yang diruangkan dalam PK Eselon 2 sesuai dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya;
3. Merumuskan IKU berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB;
4. Memerintahkan Tim Penyusun Laporan Kinerja dalam tahap penyusunan laporan kinerja untuk melakukan reuiu berjenjang dan dituangkan dalam dokumen reuiu berjenjang yang diotorisasi kepala perangkat daerah.

Indikator Sasaran kinerja dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target.

- a. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

Indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target adalah Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dihitung berdasarkan Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan Daerah yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan. Indikator yang termasuk dalam indikator kinerja sasaran strategis adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya, dan persentase desa siaga aktif mandiri. Dari seluruh indikator tersebut, ada satu indikator yang belum tercapai yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3. 7
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Perangkat Daerah Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025
dengan Tahun-Tahun sebelumnya

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	88,89	87,50	100	88,89	88,89	100	88,89

Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

Pada tahun 2025 dari data realisasi Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target menunjukkan angka 88,89%, lebih

tinggi dari nilai tahun 2024 yaitu sebesar 87,50%. Dari tabel menunjukkan bahwa persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 88,89%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai Nilai Realisasi Kinerja \leq 75%, yang artinya kinerja capaian Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target masuk ke dalam **kategori capaian tinggi**.

- a) Faktor-faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis PD yang mencapai target
 1. Perencanaan dan Penganggaran yang jelas dan terukur;
 2. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten;
 3. Pemanfaatan teknologi informasi.

- b) Faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian kinerja Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis PD yang mencapai target
 1. Masih Kurangnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan Daerah;
 2. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.

- c) Rekomendasi dalam pencapaian kinerja Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis PD yang mencapai target
 1. Peningkatan Kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Daerah;
 2. Peningkatan Kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan Daerah;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pelatihan dan pendidikan peningkatan kompetensi.

3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak lahir) berdasarkan rata-rata statistik (berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada <https://jateng.bps.go.id/>). Perhitungan angka harapan hidup sangat bergantung pada data kematian dalam tabel kematian dan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam metode *life table*.

Tabel 3. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator AHH Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025
dengan Tahun-Tahun sebelumnya

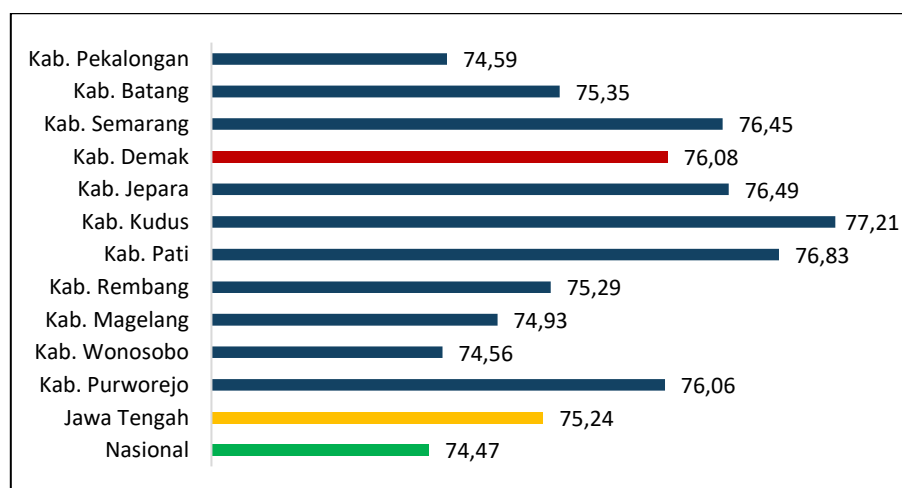
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Harapan Hidup	75,52	75,6	75,79	75,91	76,08	100,22	75,66	100,55

Sumber : BPS Tahun 2025

Target AHH pada tahun 2025 sebesar 75,91 dengan realisasi AHH sebesar 76,08, hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja atas target AHH tahun 2025 sebesar 100,22% dan persentase capaian kinerja atas target akhir Renstra sebesar 100,55%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian angka harapan hidup masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. AHH di Kabupaten Demak selama tahun 2022-2025 menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan. Tahun 2024 AHH sebesar 75,79, dan pada tahun 2025 AHH meningkat menjadi 76,08. Peningkatan umur harapan hidup menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2025 mempunyai harapan hidup mencapai umur 76,08 tahun lebih panjang 0,29 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir ditahun 2024.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Demak tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah, capaian kabupaten Demak lebih tinggi dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Tengah sebesar 75,24. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan perbandingan antara capaian AHH kabupaten Demak dengan AHH di kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 3. 5
Angka Harapan Hidup (AHH) Prov. Jateng Tahun 2025



Sumber : BPS Tahun 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) bukan hanya dipengaruhi oleh kesehatan tetapi juga dipengaruhi oleh Perilaku, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh komponen ini harus terintegrasi, tidak bisa hanya melakukan perbaikan pada salah satu komponen saja. Komponen-komponen ini saling terkait satu sama lain. Beberapa komponen yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebagai berikut :

Gambar 3. 3
Komponen yang mempengaruhi AHH



Infografis dibuat oleh geminiAI

- a) Faktor-faktor yang mendukung dalam pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)
 1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 2. Menurunnya Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular;
 3. Pemanfaatan aplikasi Cengkrama Mata Elang (CME) dengan optimal;
 4. Meningkatnya status gizi didukung dengan semakin berkurangnya Gizi buruk baik stunting maupun wasting;
 5. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi;
 6. Partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi Germas dan PHBS.

- b) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)
 1. Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita;
 2. Masih adanya kasus kekurangan gizi yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus Balita Gizi buruk dan Masih adanya kasus stunting;
 3. Masih terjadi keterlambatan tenaga kesehatan dalam mengenali faktor resiko tinggi pada ibu hamil dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran ibu dan keluarga dalam mengenali faktor resiko tinggi dan penyakit yang penyertanya;
 4. Masih kurang optimalnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.

c) Rekomendasi dalam pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)

1. Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui Peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
2. Peningkatan status gizi. Melalui Peningkatan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD.
3. Memaksimalkan pendampingan kader ibu hamil risiko tinggi dan memaksimalkan kelas ibu hamil yang diikuti oleh ibu hamil dan suami atau keluarga di seluruh desa, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Cengkraman Mata elang (CME), memaksimalkan pelaksanaan rujukan terencana secara berkala, Memberikan pelayanan ANC berkualitas secara terintegrasi dengan lintas program.
4. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS, Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan penyebaran informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

Indikator sasaran kinerja dari Angka Harapan Hidup adalah :

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan variabel yang sangat perlu menjadi perhatian, karena variabel tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di suatu wilayah. Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Indikator AKB adalah indikator negatif yang apabila kurang dari target yang ditetapkan maka menunjukkan kinerja baik. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{AKB} = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi < 1 tahun dalam satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1000$$

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status

gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Tabel 3. 9
Perbandingan Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

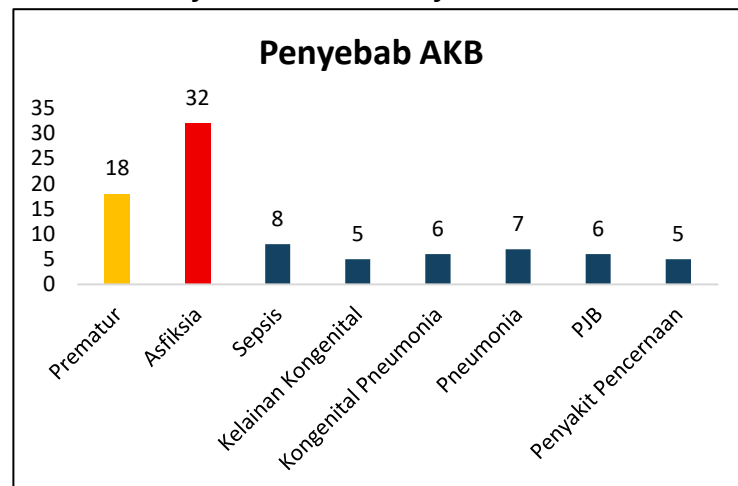
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,73	3,41	7,46	7,25	6,73	107,17	4,7	56,81

Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

Pada tahun 2025 dari data realisasi kinerja AKB menunjukkan angka 6,73 dari target tahun 2025 sebesar 7,25. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 107,17%, lebih tinggi persentase capaian kinerjanya dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar -18,77%. Meskipun telah mencapai target pada tahun 2025, akan tetapi capaian terhadap target Akhir renstra tahun 2026 belum tercapai yaitu sebesar 56,81% dengan target 2026 sebesar 4,7. AKB merupakan indikator negatif sehingga apabila realisasi semakin rendah dari target maka capaian kinerjanya semakin baik. Selain itu, pada tahun 2025 AKB mengalami perubahan target yang semula 3,14 berubah menjadi 7,25, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja tahun 2024 yang rendah yaitu 7,46 atau -18,77%. Meskipun demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 **kategori capaian Sangat Tinggi.**

Penyebab kematian bayi adalah Kelahiran Prematur (18 Kasus), BBLR/IUGR (4 Kasus), Asfiksia (32 Kasus), RDS/SGNN (2 Kasus), Sepsis (8 Kasus), Kelainan Kongenital (5 Kasus), Kongenital Pneumonia (6 Kasus), Pneumonia (7 Kasus), Kelainan Saluran Cerna (1 Kasus), Kelainan Metabolik (1 Kasus), Penyerta Lain pada sistem pernapasan (4 Kasus), ISPB (1 Kasus), ISPA (1 Kasus), Meningitis (1 Kasus), Demam Berdarah (3 Kasus), Penyakit Jantung Bawaan (6 Kasus), Penyakit Pencernaan (5 Kasus), dan Penyakit Sistem Respirasi (1 Kasus). Total kasus Kematian Bayi adalah sebanyak 106 Kasus. Penyebab terbanyak kematian bayi adalah Asfiksia dan Kelahiran Prematur.

Grafik 3. 6
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2025



Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

- a) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
1. Gerakan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri sebagai Upaya pencegahan anemia yang menjadi salah satu faktor kematian bayi;
 2. Optimalisasi Pelayanan ANC yang berkualitas;
 3. Pemantauan dan pendampingan rutin pada ibu hamil risiko tinggi sebagai upaya menekan angka kematian bayi (AKB);
 4. Tenaga Kesehatan yang berkompetensi dalam bidangnya;
- b) Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
1. Masih adanya keterlambatan tenaga kesehatan dalam mengenali faktor resiko tinggi ibu hamil;
 2. Belum optimalnya pelayanan antenatal;
 3. Pengetahuan dari ibu hamil dan keluarga serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.
- c) Rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
1. Peningkatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pelatihan ini juga dilakukan untuk prnatalaksanaan Asfiksia dan BBLR di faskes pratama;
 2. Optimalisasi gerakan pemberian table tambah darah untuk remaja putri;
 3. Proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan;
 4. Edukasi terhadap ibu hamil dan keluarganya.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Nilai Angka kematian Ibu (AKI) diperoleh dari Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 100.000. Berikut perbandingan AKI Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 10
Perbandingan Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

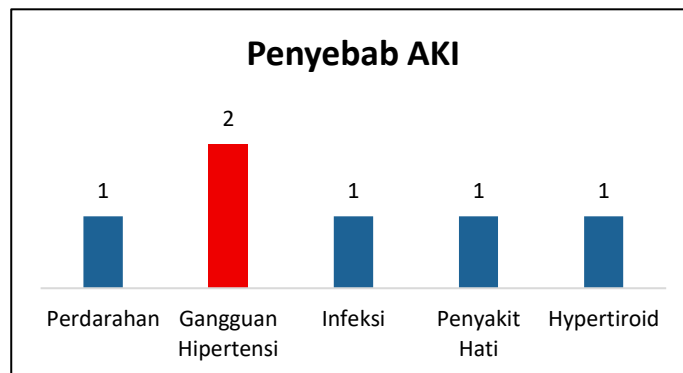
NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	67,30	63,88	48,50	63,50	38,11	139,99	95,00	159,89

Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

Pada tahun 2025 dari data realisasi menunjukkan angka 38,11 dengan nilai target AKI tahun 2025 sebesar 63,50. Indikator AKI dan AKB merupakan indikator negatif (semakin rendah angka realisasi dari target maka semakin baik capaiannya). Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 139,99%, angka ini lebih tinggi dari persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 123,74% dan telah mencapai target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 159,89%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian Angka Kematian Ibu (AKI) masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**.

Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2025 adalah adanya kasus Perdarahan (1 Kasus), Gangguan Hipertensi (2 Kasus), Infeksi (1 Kasus), Penyakit Hati (1 Kasus), dan Hypertiroid (1 Kasus), total kasus kematian ibu (AKI) adalah 6 kasus.

Grafik 3.7
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2025



Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

- a) Faktor-Faktor yang mendukung dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
 1. Adanya program Kelas Ibu Hamil;
 2. Layanan ANC yang terintegrasi;
 3. Proses bersalin yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih;
 4. PMT untuk ibu hamil;
 5. Tenaga Kesehatan yang berkompetensi pada bidangnya;
 6. Pemanfaatan Aplikasi Cengkraman Mata Elang (CME) secara maksimal.
 - b) Faktor-faktor yang menghambat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
 1. Pelayanan ANC terpadu masih belum dilaksanakan sesuai dengan standar 12T dengan minimal 6 kali;
 2. Masih adanya ibu hamil resiko tinggi dan penyakit penyerta dan masih belum terlaksananya rujukan terencana untuk sasaran ibu hamil resiko tinggi dan memiliki penyakit penyerta.
 - c) Rekomendasi dalam pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
 1. Penguatan dan peningkatan kualitas ANC sesuai standar 12T dan minimal 6 kali;
 2. Menjadwalkan rujukan terencana untuk ibu hamil beresiko tinggi.
- 3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya

Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional. Perhitungan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya yaitu Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dikali

100. Dalam rangka transformasi sistem kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, salah satunya dilakukan dengan penilaian terhadap tingkat mutu yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi.

Tabel 3. 11
Perbandingan Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Terakreditasi Minimal Madya Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,10	107,41

Sumber : Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025

Pada tahun 2025 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan terakreditasi Minimal Madya mencapai 100% dengan 29 pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi paripurna, dengan capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 107,41%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

- a) Faktor Pendukung Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan terakreditasi Minimal Madya
 1. Pendampingan intensif Tim TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan);
 2. Pemenuhan Standar Sarpras dan alat kesehatan;
 3. Penerapan Budaya Keselamatan Pasien.
- b) Faktor Penghambat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan terakreditasi Minimal Madya
 1. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan telah terakreditasi paripurna, pada praktiknya masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai akreditasi;
 2. Masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam praktiknya.

- c) Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan terakreditasi Minimal Madya
1. Melakukan monitoring rutin pada fasilitas pelayanan kesehatan (bukan hanya saat akan menjelang akreditasi saja);
 2. Komitmen bersama dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam proses akreditasi;
 3. Mempersiapkan sumber daya yang berkualitas guna mendukung pelaksanaan akreditasi sebagai kewajiban regulasi;
 4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan pihak lain.

4) Persentase Desa Siaga aktif mandiri

Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Perhitungan persentase desa siaga aktif mandiri yaitu Jumlah desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa dalam satu tahun tertentu dikali 100

Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Tabel 3. 12
Perbandingan Capaian Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Dinkesda Kab. Demak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	61,04	83,00	100	100	100	100	47	212,77

Sumber : Dinkes kab. Demak Tahun 2025

Pada tahun 2025 mencapai 100%, Capaian ini sama dengan tahun 2024. Indikator ini telah mencapai target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 212,77%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2025 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja Persentase Desa Siaga aktif mandiri masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**.

a) Faktor Pendukung Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri

1. Keaktifan Desa/Kelurahan Sehat;
2. Kompetensi dan Loyalitas Kader;

3. Dukungan dari Lintas Sektor.
- b) Faktor yang menghambat Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri
 1. Integrasi pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan secara optimal.
- c) Rekomendasi Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri
 1. Advokasi dan koordinasi secara masif kepada pengambil kebijakan terkait desa dan kelurahan agar pelaksanaan kegiatan di desa atau kelurahan dilaksanakan secara terintegrasi.

3.2.2 Analisis Penyebab Kegagalan / Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Daerah meliputi sebagai berikut:
 - 1) Belum optimalnya pelayanan KIA, Masih adanya kasus kekurangan gizi (stunting, gizi kurang, balita kurus, ibu hamil KEK), kurangnya tenaga dan kualitas bidan dan tenaga medis PONEC, serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Masih Adanya Penyakit Menular dan penendalian penyakit tidak menular;
 - 3) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 4) Masih kurang optimalnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.
- b. Upaya yang Telah Dilakukan
 - 1) Meningkatkan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga bidan desa dan tenaga PONEC, peningkatan pengetahuan keluarga dengan Ibu Maternal, Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak sertapemberian makanan tambahan.
 - 2) Pembentukan dan pembinaan Posbindu, peningkatan UKBM, peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), meningkatkan kualitas lingkungan melalui

pemeriksaan kualitas air minum, rumah sehat, akses air bersih, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) dan pemukiman jamban, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan dengan *stakeholder* terkait. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

- 3) Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan Daerah dalam penerapan nilai-nilai akreditasi, serta adanya komitmen fasilitas pelayanan kesehatan dalam peningkatan mutu;
- 4) Mengoptimalkan Kegiatan Promotif Preventif melalui GERMAS, Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

c. Strategi

Adapun Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain Peningkatan Pelayanan Kesehatan promotif, Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan rehabilitatif.

- 1) Peningkatan status gizi dengan pemberian Makanan tambahan pada balita dengan berat badan dibawah garis merah dan penderita gizi buruk; Peningkatan deteksi tumbuh kembang sejak dini pada anak PAUD untuk mencegah adanya permasalahan gizi; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui Peningkatan kualitas pelayanan ANC dengan minimal pelayanan 6 kali selama kehamilan; Pemanfaatan Pemeriksaan USG minimal 2 kali selama kehamilan pada trimester 1 dan trimester 3; Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONEK, RS PONEK; dan peningkatan pola asuh balita dan peningkatan pengetahuan petugas;
- 2) Peningkatan mutu pelayanan untuk menurunkan penyakit menular dan tidak menular; kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
- 3) Peningkatan Koordinasi dan Advokasi Secara masif; Peningkatan Kapasitas tim Internal dan tim eksternal, serta melakukan monitoring dan evaluasi, serta Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta monitoring dan evaluasi rutin terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- 4) Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS. Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan

penyebarluasan informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

3.2.3 Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja

1. Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Cek Kesehatan Gratis (CKG) berbasis siklus hidup, program ini merupakan program unggulan baru yang selaras dengan program nasional. Masyarakat dapat melakukan skrining kesehatan secara gratis di puskesmas untuk deteksi dini penyakit. Cek Kesehatan Gratis juga dilaksanakan di sekolah dan perusahaan.



Gambar 3. 4 Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG)

2. Optimalisasi Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) Demak tahun 2025 mencapai 99,52%, keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) didukung oleh program SRIKANDI DEMAK (Sinergi Reaktivasi Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Demak dengan Inovasi Dukungan Pembiayaan Pihak Ketiga)/CSR untuk keberlanjutan UHC. Selain itu, dalam upaya optimalisasi UHC Demak, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti Dinas Sosial P2PA, dan BPJS Kesehatan.



Gambar 3. 5 Kegiatan Optimalisasi UHC Demak

3. Rumah Gizi Balita

Rumah Gizi Balita adalah program yang menyediakan layanan gizi dan kesehatan untuk balita yang mengalami masalah gizi dengan menghadirkan dokter untuk melakukan konsultasi yang harapannya dapat membantu meningkatkan status gizi pada daerah lokus stunting. Kegiatan ini juga meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) intensif, edukasi pola asuh, dan pemantauan tumbuh kembang balita.



Gambar 3. 6 Kegiatan Rumah Gizi Balita

4. Cengkraman Mata Elang (CME)

Masih tingginya AKI, AKB dan kasus stunting yang disebabkan oleh karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat, kemiskinan yang masih tinggi, adat istiadat yang masih kolot, rujukan terlambat, kepedulian masyarakat yang masih rendah. Maka perlu adanya sebuah inovasi yang mudah, murah dan dapat dikelola oleh masyarakat sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat sehingga diciptakan inovasi Cengkraman Mata Elang (CME).



Gambar 3. 7 Cengkraman Mata Elang

Cengkraman Mata Elang adalah inovasi berupa aplikasi untuk memantau kesehatan ibu hamil dan bayi di Kabupaten Demak. Inovasi ini bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi, serta stunting. Inovasi ini semula bertujuan untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam perjalanannya Inovasi ini berkembang dengan menambahkan menu Pemantauan Stunting sehingga saat ini Cengkraman mata elang (CME) telah menjadi CME Plus. Dengan Aplikasi CME Plus ini maka Data dapat terintegrasi dalam satu wadah dari tingkat kader, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sehingga memudahkan kader melaporkan kondisi bumil, ibu bersalin dan balita stunting di wilayah kerjanya.

5. Latanza (Pelayanan Antar Jemput Pasien dan Pelayanan Mobil Ambulance Jenazah)

DES PSC 119, tujuan dari Latanza adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan pra Rumah Sakit terhadap pasien (masyarakat Kabupaten Demak). Sejalan dengan salah satu Program Demak Smart City yang mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan pemenuhan prasarana sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Sehingga Signifikan dengan tuntutan masyarakat saat ini dan sasaran menurunnya Angka Kematian Dan Angka Kesakitan (Pra-Rumah Sakit) dapat tercapai. Dengan Menurunnya Angka Kematian dan Kesakitan maka dapat mendukung peningkatan Angka Harapan hidup (AHH).



Gambar 3. 8 Latanza

3.2.4 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan pada realisasi Anggaran dan Realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) diluar program rutin maka efektifitas dan efisiensi anggaran dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Program}}{\% \text{ Capaian Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

Capaian dapat dikategorikan dalam kategori **efektif** apabila **capaian kinerja sama dengan atau lebih dari 100%**.

Analisis efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan output yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja Program} - \% \text{ Capaian Realisasi Anggaran}$$

Capaian dapat dikategorikan dalam kategori **efisiensi** apabila **nilai kurang dari atau sama dengan 100%**.

a. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Tujuan

Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah memiliki tiga tujuan yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah, dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Berikut capaian kinerja dan anggaran Tujuan Dinas Kesehatan:

Tabel 3. 13
Tingkat Capaian Efektivitas dan Efisiensi Tujuan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%				
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,50	91,52	100,01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.212.796.562,34	307.613.700.447,20	94,01				
							Rata-Rata Capaian dari Indikator			100,02	Total Per-Sasaran	327.212.796.562,34	307.608.746.947,20	94,01
Tingkat Efisiensi : 6,01							Tingkat Efektifitas : 106,40							
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	2.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	85,13	84,15	98,85	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.935.177.545,00	135.202.024.850,00	93,93				
							Rata-Rata Capaian dari Indikator			98,85	Total Per-Sasaran	143.935.177.545,00	135.202.024.850,00	93,93
Tingkat Efisiensi : 4,92							Tingkat Efektifitas : 105,23							
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,91	76,08	100,22	3 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	133.116.433.779,50	129.012.760.417,00	96,92				
							4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.591.791.000,00	1.566.221.178,00	98,39				
							5 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	632.302.000,00	617.083.800,00	97,59				
							6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.036.965.100,00	997.692.450,00	96,21				
							Rata-Rata Capaian dari Indikator			100,22		136.377.491.879,50	32.193.757.845,00	96,93
							Tingkat Efisiensi : 3,29							Tingkat Efektifitas : 103,40
							Total Keseluruhan:	607.525.465.986,84	575.004.529.642,20	94,65				

Sumber : Dinkesda kab. Demak Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penghitungan efektivitas dan efisiensi terhadap capaian program dan anggaran pada ketiga tujuan Dinas Kesehatan Daerah, hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada tujuan pertama yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 106,40% dan efisiensi sebesar 6,01%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada tujuan Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas

Kesehatan Daerah **sudah efektif dan efisien**. Dalam tujuan ini terdapat satu program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 94,01%. Nilai IKM Dinas Kesehatan Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2025 mencapai 91,52%. Indikator IKM adalah Persentase Keluhan Masyarakat, pada tahun 2025 keluhan masyarakat telah terlayani sepenuhnya sejumlah 11 keluhan yang masuk ke Dinas Kesehatan Daerah.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada tujuan kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan adalah 105,23% dan efisiensi sebesar 4,92 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah **sudah efektif dan efisien**. Dalam tujuan ini terdapat satu program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 93,93%. Pada Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah mencapai 84,15, angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 84,00.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Angka Harapan hidup (AHH) adalah 103,40% dan efisiensi sebesar 3,29 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat **sudah efektif dan efisien**. Dalam tujuan ini terdapat empat program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 96,92%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 98,39%; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 97,59%; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 96,21%. Dengan Adanya inovasi-inovasi seperti Cengkraman Mata Elang (CME) dan Latanza membantu dalam menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian yang artinya mendukung dalam peningkatan Angka Harapan Hidup sehingga capaian tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dapat efektif dan efisien.

b. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran

Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah memiliki lima Sasaran yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif, Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Menurunnya Angka Kematian, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Berikut capaian kinerja dan anggaran Sasaran Dinas Kesehatan:

Tabel 3. 14
Tingkat Capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	1.1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.212.796.562,34	307.613.700.447,20	94,01
		Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator					100	Total Per-Sasaran	327.212.796.562,34	307.608.746.947,20	94,01
Tingkat Efisiensi							: 5,99				
Tingkat Efektifitas							: 106,37				
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	2.1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	%	100	88,89	88,89	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.935.177.545,00	135.202.024.850,00	93,93
		Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator					88,89	Total Per-Sasaran	143.935.177.545,00	135.202.024.850,00	93,93
Tingkat Efisiensi							: -5,04				
Tingkat Efektifitas							: 94,63				
3	Menurunnya Angka Kematian	3.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	7,25	6,73	107,17	3 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	133.116.433.779,50	129.012.760.417,00	96,92
		3.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	63,5	38,11	139,98				
Rata-Rata Capaian dari 2 Indikator					123,58		Total Per-Sasaran	133.116.433.779,50	129.012.760.417,00	96,92	
Tingkat Efisiensi							: 26,66				
Tingkat Efektifitas							: 127,51				
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	4.1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.591.791.000,00	1.566.221.178,00	98,39
								5 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	632.302.000,00	617.083.800,00	97,59
Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator					100		Total Per-Sasaran	2.224.093.000,00	2.183.304.978,00	98,17	
Tingkat Efisiensi							: 1,83				
Tingkat Efektifitas							: 101,87				

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
5	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	5.1 Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	100	100	100	6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.036.965.100,00	997.692.450,00	96,21
Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator				100			Total Per-Sasaran	1.036.965.100,00	997.692.450,00	96,21
Tingkat Efisiensi							: 3,79			
Tingkat Efektifitas							: 103,94			
Total Keseluruhan:								607.525.465.986,84	575.004.529.642,20	94,65

Sumber : E-SAKIP yang diolah oleh Dinkesda kab. Demak Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penghitungan efektivitas dan efisiensi terhadap capaian program dan anggaran pada kelima tujuan Dinas Kesehatan Daerah, hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada Sasaran pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 106,37% dan efisiensi sebesar 5,99%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif **sudah efektif dan efisien**. Dalam Sasaran ini terdapat satu program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 94,01%.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada Sasaran Kedua yaitu Meningkatkan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan dengan Indikator Meningkatkan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan adalah 94,63% dan efisiensi sebesar -5,04 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada Sasaran Meningkatkan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan **belum efektif dan efisien**. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai SAKIP sehingga capaian Dalam Sasaran belum efektif dan efisien. ini terdapat satu program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 93,93%.

3. Sasaran 3 : Menurunnya Angka Kematian

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada Sasaran Ketiga yaitu Menurunnya Angka Kematian dengan Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 127,51% dan efisiensi sebesar 26,66 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada Sasaran Menurunnya Angka Kematian **sudah efektif dan efisien**. Dalam Sasaran ini terdapat satu program di Dinas Kesehatan

Daerah yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 96,92%.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada Sasaran Keempat yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya adalah 101,87% dan efisiensi sebesar 1,83%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan **sudah efektif dan efisien**. Dalam Sasaran ini terdapat dua program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 98,39% dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 97,59%.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Hasil perhitungan Efektivitas dan Efisiensi pada Sasaran Kelima yaitu Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Indikator Persentase Desa Siaga aktif mandiri adalah 103,94% dan efisiensi sebesar 3,79%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan program pada Sasaran Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat **sudah efektif dan efisien**. Dalam Sasaran ini terdapat satu program di Dinas Kesehatan Daerah yaitu dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 96,21%.

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100	100,00	100
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun	7	14	21	7	7	100,00	7
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	3	1	1	100,00	1
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2	1	1	100,00	1
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2	1	1	100,00	1
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	8	4	4	100,00	4
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1	2	3	1	1	100,00	1
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.437	3503	4933	1.437	1490	103,69	1.437

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	2	3	1	1	100,00	1
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	3	1	1	100,00	1
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN	100	100	100	100	100	100,00	100
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1	1	2	1	1	100,00	1
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	2	1	1	100,00	1
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100,00	100
1.4.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	2	3	1	1	100,00	1
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	6	8	122	127	104,10	122
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100,00	100
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	11	22	33	11	11	100,00	11
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	8	16	24	8	8	100,00	8

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	12	18	6	6	100,00	6
1.5.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	12	6	6	100,00	6
1.5.5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	12	18	6	6	100,00	6
1.5.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	6	9	3	3	100,00	3
1.5.7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	2	1	1	100,00	1
1.5.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	50	100	159	50	44	88,00	50
1.5.9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	60	90	30	16	53,33	30
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	25	98	145	25	25	100,00	25
1.6.2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	78	98	20	20	100,00	20
1.6.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	8	11	2	2	100,00	2
1.6.4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	7	9	2	2	100,00	2
1.6.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2	3	1	1	100,00	1
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	100	100	100	100	100,00	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2	3	1	1	100,00	1
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	24	36	12	12	100,00	12
1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	3	5	2	2	100,00	2
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	44	72	119	44	75	170,45	44
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2	3	1	9	900,00	1
1.8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	38	57	19	28	147,37	19
1.8.3.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	3	5	8	3	3	100,00	3
1.8.4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	10	19	6	14	233,33	6
1.8.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	6	9	3	8	266,67	3
1.8.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	9	15	6	7	116,67	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.8.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	2	8	6	6	100,00	6
1.9.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	29	29	29	29	29	100,00	29
1.9.1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29	29	29	29	29	100,00	29
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM bidang kesehatan	100	100	100	100	100	100,00	100
2.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	100,00	2,4
2.1.1.	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6	1	2	6	13	216,67	6
2.1.3.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1	23	49	3	96	3200,00	3
2.1.6.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	0	1	1	1	100,00	1
2.1.7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	352969	294974	736185	352969	296.604	84,03	352969

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100,00	100
2.2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.598	39983	57982	15.598	15769	101,10	15.598
2.2.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.598	38955	55385	15.598	15769	101,10	15.598
2.2.3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.855	39045	55536	14.855	15745	105,99	14.855
2.2.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77.587	158466	235269	77.587	79423	102,37	77.587
2.2.5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179.921	358027	537387	179.921	179921	100,00	179.921
2.2.6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	822.231	1556596	2334894	822.231	822231	100,00	822.231
2.2.7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135.238	254062	389218	135.238	135238	100,00	135.238
2.2.8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309.414	622882	932861	309.414	309414	100,00	309.414
2.2.9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.079	37880	57194	19.079	19079	100,00	19.079

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.510	5313	7909	2.510	3015	120,12	2.510
2.2.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.290	24540	42440	12.290	19749	160,69	12.290
2.2.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	21.612	40204	64702	21.612	24160	111,79	21.612
2.2.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	4	6	2	2	100,00	2
2.2.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	10	15	5	5	100,00	5
2.2.17.	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	4	7	2	2	100,00	2
2.2.18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.19.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	2	3	1	1	100,00	1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza	27	27	27	27	27	100,00	27
2.2.21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000	0	1000	1000	2638	263,80	1000
2.2.22.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.23.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.24.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	80	60	100	80	101	126,25	80
2.2.25.	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	29	29	29	29	29	100,00	29
2.2.26.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.27.	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.28.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29	29	29	29	29	100,00	29
2.2.29.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2	1	3	2	2	100,00	2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.30.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	2	4	1	1	100,00	1
2.2.31.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	2	3	1	1	100,00	1
2.2.32.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1700	1500	3723	1700	2285	134,41	1700
2.2.33.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65	140	304	65	123	189,23	65
2.2.34.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	34	53	10	38	380,00	10
2.2.35.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2	1	4	2	2	100,00	2
2.2.36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	1	1	1	100,00	1
2.2.37.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	1	1	1	100,00	1
2.2.38.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	1	1	100,00	1
2.2.39.	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	1	1	100,00	1
2.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik	1	2	3	1	1	100,00	1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	2	3	1	1	100,00	1
2.4.	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional	5	5	6	5	6	120,00	5
2.4.1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5	5	6	5	6	120,00	5
2.4.2.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	5	6	5	6	120,00	5
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN BERKOMPETENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100	100	100	100	100	100,00	100
3.1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes Mendapat Rekomendasi Ijin Praktik	100	100	100	100	100	100,00	100
3.1.1.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	2	3	1	1	100,00	1
3.1.2.	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	4	6	2	2	100,00	2
3.2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	1	2	3	1	1	100,00	1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	2	3	1	1	100,00	1
3.2.2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	900	1600	2450	900	901,7	100,19	900
3.2.3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	2	3	1	1	100,00	1
3.3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis	100	100	100	100	100	100,00	100
3.3.1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	350	612	962	350	407	116,29	350
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SERTA SARANA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI KETENTUAN	100	100	100	100	100	100,00	100
4.1.	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100	100	100	100	100,00	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	45	80	120	45	45	100,00	45
4.2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT	100	200	300	100	100	100,00	100
4.2.1.	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	100	200	300	100	100	100,00	100
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS (BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)	93,6	92,78	93,55	93,6	93,63	100,03	93,60
5.1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat	10	2	10	10	10	100,00	10

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)
						Target tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3	1	1	100,00	1
5.2.	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	337.000	662005	999484	337.000	361698	107,33	337.000
5.2.1.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	2	4	7	2	2	100,00	2
5.3.	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Mandiri	46,5	77	77	46,5	86,50	186,02	46,5
5.3.1.	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	4	7	2	2	100,00	2

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Daerah s/d Tahun 2025 terlihat capaian kinerja Program dan kegiatan yang sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan.

3.2.5 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Masalah kesehatan bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan. Keberhasilan Pencapaian dan upaya pencapaian kinerja kesehatan yang optimal seringkali bergantung pada dukungan dan kolaborasi dari berbagai sektor lain di luar bidang kesehatan.

Pada sektor Pendidikan berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, mempromosikan kebiasaan hidup sehat sejak dini di sekolah, dan upaya dan dukungan usaha kesehatan sekolah. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan dan permukiman memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, yang merupakan hal mendasar dalam upaya kesehatan masyarakat, intervensi sensitif terhadap pencegahan stunting serta pencegahan penyakit menular. Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, dan aman untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting. Sektor Sosial memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, memastikan akses mereka terhadap layanan kesehatan, dan menangani determinan sosial kesehatan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sektor Keuangan dan Perencanaan Pembangunan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program kesehatan dan memastikan integrasi prioritas kesehatan dalam rencana pembangunan bidang kesehatan. Sektor pembiayaan Jaminan kesehatan dengan BPJS kesehatan dalam menjamin aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin.

Kolaborasi ini tidak hanya mencakup antar instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kesehatan Daerah didukung oleh 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 1 laboratorium kesehatan, 27 puskesmas sebagai Unit Organisasi bersifat Fungsional (UOBF), dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah) sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK). Masing masing UPTD di berikan Kuasa pengguna anggaran sehingga proses perencanaan dan realisasi anggaran dilaksanakan langsung oleh UPTD. Pendapatan Dinas Kesehatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber pada hasil retribusi Laboratorium kesehatan, BLUD

puskesmas dan BLUD rumah sakit. Urusan Dinas Kesehatan Daerah menargetkan pendapatan sejumlah Rp. 281.878.179.918,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 299.460.515.332,83 (106,24%). Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024, maka tahun 2025 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 13.671.147.117,41 atau 4,78% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 285.787.188.215,42. Rincian target dan realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Daerah tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 16
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Retribusi	281.878.179.918,00	299.460.515.332,83	106,24	211.947.534,00
2	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	285.575.240.681,42
Jumlah PAD		281.878.179.918,00	299.460.515.332,83	106,24	285.787.188.215,42

Sumber Data: Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1) Hasil Retribusi

Tahun 2025, Hasil Retribusi ditargetkan sejumlah Rp. 281.878.179.918,00 dengan Realisasi Hasil Retribusi sebesar Rp. 299.460.515.332,83 (106,24%). Realisasi hasil retribusi telah melebihi target pendapatan dan Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 13.671.147.117,41 atau 4,78% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 285.787.188.215,42.

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah didapatkan dari hasil pendapatan BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas. Pendapatan Tahun 2020 ditargetkan sejumlah Rp. 0,00 dengan Realisasi Hasil BLUD sebesar Rp. 0,00 (0%).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Pada Tahun 2025 yang tersedia sebesar Rp. 583.178.493.310,00 pada perubahan anggaran mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 20.943.354.676,84 sehingga menjadi Rp. 604.121.847.986,84 kemudian Dinas Kesehatan Daerah mendapatkan

tambahan dari anggaran Insentif Fiskal sebesar Rp. 3.403.618.000,00 sehingga menjadi Rp. 607.525.465.986,84. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 575.004.529.642,20 atau sebesar 94,65%. Rekapitulasi anggaran belanja dan realisasi belanja anggaran Dinas Kesehatan Daerah tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 17
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	607.525.465.986,84	575.004.529.642,20	94,65	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	607.525.465.986,84	575.004.529.642,20	94,65	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	471.147.974.107,34	442.810.771.797,20	93,99	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.770.500,00	332.038.151,00	83,27	
1.1.1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	287.583.500,00	255.557.289,00	88,86	
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000,00	22.741.000,00	90,96	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000,00	22.291.000,00	89,16	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.187.000,00	31.448.862,00	51,40	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.536.407.045,00	134.869.986.699,00	93,96	
1.2.1.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	136.702.944.545,00	128.342.616.362,00	93,88	
1.2.2.	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	6.486.812.500,00	6.216.437.795,00	95,83	
1.2.3.	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	346.650.000,00	310.932.542,00	89,70	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	4.493.300,00	44,93	
1.3.1.	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	10.000.000,00	4.493.300,00	44,93	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.000.000,00	372.854.050,00	86,71	
1.4.1.	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	30.000.000,00	13.490.500,00	44,97	
1.4.2.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	400.000.000,00	359.363.550,00	89,84	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.964.900,00	460.419.326,00	84,64	

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
1.5.1.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	25.000.000,00	9.274.000,00	37,10	
1.5.2.	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	93.832.200,00	84.493.900,00	90,05	
1.5.3.	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	24.060.600,00	22.429.000,00	93,22	
1.5.4.	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	119.750.900,00	91.900.000,00	76,74	
1.5.5.	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	43.781.200,00	42.770.550,00	97,69	
1.5.5.	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.000.000,00	11.370.000,00	94,75	
1.5.7.	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	20.000.000,00	4.738.000,00	23,69	
1.5.8.	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	180.540.000,00	179.420.451,00	99,38	
1.5.9.	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	25.000.000,00	14.023.425,00	56,09	
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	383.358.100,00	319.742.400,00	83,41	
1.6.2.	<i>Pengadaan Mebel</i>	36.773.600,00	32.026.600,00	87,09	
1.6.3.	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	229.444.900,00	197.046.001,00	85,88	
1.6.4.	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	92.139.600,00	81.234.799,00	88,16	
1.6.5.	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	25.000.000,00	9.435.000,00	37,74	
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.738.548.000,00	2.332.557.689,00	85,17	
1.7.1.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.7.2.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	2.535.007.319,00	2.287.212.739,00	90,23	
1.7.3.	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	198.540.681,00	40.344.950,00	20,32	
1.8.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	398.950.000,00	370.625.616,00	92,90	
1.8.1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	25.000.000,00	24.438.500,00	97,75	
1.8.2.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	113.680.000,00	112.784.896,00	99,21	
1.8.3.	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	5.000.000,00	4.600.000,00	92,00	
1.8.4.	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	50.270.000,00	42.635.450,00	84,81	

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
1.8.5.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	100.000.000,00	98.614.000,00	98,61	
1.8.6.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	75.000.000,00	69.904.770,00	93,21	
1.8.7.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	30.000.000,00	17.648.000,00	58,83	
1.9.	Peningkatan Pelayanan BLUD	322.707.975.562,34	303.748.054.566,20	94,12	
1.9.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	322.707.975.562,34	303.748.054.566,20	94,12	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	133.116.433.779,50	129.012.760.417,00	96,92	
2.1.	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	40.306.890.492,00	38.526.815.071,00	95,58	
2.1.1.	<i>Pengembangan Puskesmas</i>	10.800.000.000,00	10.682.134.700,00	98,91	
2.1.3.	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	19.366.196.000,00	18.788.140.667,00	97,02	
2.1.5.	<i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>	9.784.869.492,00	8.741.841.566,00	89,34	
2.1.6.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</i>	355.825.000,00	314.698.138,00	88,44	
2.2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	92.148.073.179,50	89.848.618.796,00	97,50	
2.2.1	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	2.471.426.000,00	2.465.187.000,00	99,75	
2.2.2.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	200.000.000,00	191.040.950,00	95,52	
2.2.3.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	294.981.600,00	285.896.914,00	96,92	
2.2.4.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	140.000.000,00	138.420.450,00	98,87	
2.2.5.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	1.252.946.000,00	1.245.286.700,00	99,39	
2.2.6.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	753.378.100,00	708.343.566,00	94,02	
2.2.7.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	108.100.000,00	105.818.400,00	97,89	
2.2.8.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	50.000.000,00	49.819.925,00	99,64	

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
2.2.9.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	85.000.000,00	84.352.575,00	99,24	
2.2.10.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	348.550.000,00	344.981.575,00	98,98	
2.2.11.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	1.311.790.000,00	1.287.941.800,00	98,18	
2.2.12.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	458.000.000,00	418.575.375,00	91,39	
2.2.13.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	350.000.000,00	343.698.500,00	98,20	
2.2.14.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	6.580.720.200,00	6.533.877.592,00	99,29	
2.2.15.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	252.584.600,00	247.577.575,00	98,02	
2.2.16.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	763.050.300,00	513.794.249,00	67,33	
2.2.17.	<i>Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</i>	399.458.400,00	385.943.850,00	96,62	
2.2.18.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	25.000.000,00	24.852.027,00	99,41	
2.2.19.	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	542.172.000,00	540.533.000,00	99,70	
2.2.20.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	15.975.400,00	15.671.000,00	98,09	
2.2.21.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>	85.730.000,00	85.650.000,00		
2.2.22.	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	3.644.238.000,00	3.437.187.959,00	94,32	
2.2.23.	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	62.937.610.179,50	61.499.947.687,00	97,72	
2.2.24.	<i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i>	52.000.000,00	31.960.000,00	61,46	
2.2.25.	<i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	329.251.400,00	327.185.777,00	99,37	
2.2.26.	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	4.558.881.000,00	4.548.438.148,00	99,77	
2.2.27.	<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	519.981.000,00	494.017.720,00	95,01	
2.2.28.	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>	314.719.000,00	305.217.305,00	96,98	
2.2.29.	<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	33.150.000,00	28.045.500,00	84,60	
2.2.30.	<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	56.539.000,00	50.798.550,00	89,85	

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
2.2.31.	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	358.242.000,00	355.650.535,00	99,28	
2.2.32.	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>	86.750.000,00	84.483.817,00	97,39	
2.2.33.	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</i>	57.200.000,00	56.089.875,00	98,06	
2.2.34.	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>	51.800.000,00	43.307.425,00	83,61	
2.2.35.	<i>Pengelolaan Kawasan tanpa rokok</i>	70.000.000,00	67.168.525,00	95,96	
2.2.36.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi</i>	622.459.000,00	621.968.000,00	99,92	
2.2.37.	<i>Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</i>	1.157.560.000,00	1.071.058.950,00	92,53	
2.2.38.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan</i>	301.500.000,00	301.500.000,00	100,00	
2.2.39.	<i>Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>	507.330.000,00	507.330.000,00	100,00	
2.3.	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	452.268.108,00	433.621.225,00	95,88	
2.3.1	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	452.268.108,00	433.621.225,00	95,88	
2.4.	<i>Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	209.202.000,00	203.705.325,00	97,37	
2.4.1.	<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>	101.091.000,00	96.726.250,00	95,68	
2.4.2.	<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	108.111.000,00	106.979.075,00	98,95	
3.	<i>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</i>	1.591.791.000,00	1.566.221.178,00	98,39	
3.1.	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	65.000.000,00	63.082.000,00	97,05	
3.1.1.	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.000.000,00	38.986.000,00	97,47	
3.1.2.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	25.000.000,00	24.096.000,00	96,38	
3.2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	352.624.000,00	341.273.550,00	96,78	
3.2.1.	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	50.000.000,00	48.532.500,00	97,07	

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
3.2.2.	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	50.000.000,00	48.369.000,00	96,74	
3.2.3.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	252.624.000,00	244.372.050,00	96,73	
3.3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.174.167.000,00	1.161.865.628,00	98,95	
3.3.1.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.174.167.000,00	1.161.865.628,00	98,95	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	632.302.000,00	617.083.800,00	97,59	
4.1	<i>Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	60.063.000,00	58.005.000,00	96,57	
4.1.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	60.063.000,00	58.005.000,00	96,57	
4.2.	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	572.239.000,00	559.078.800,00	97,70	
4.2.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	572.239.000,00	559.078.800,00	97,70	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.036.965.100,00	997.692.450,00	96,21	
5.1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	411.700.100,00	392.327.000,00	95,29	
5.1.1.	<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	411.700.100,00	392.327.000,00	95,29	

No.	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
5.2.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.500.000,00	106.183.900,00	97,87	
5.2.1	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	108.500.000,00	106.183.900,00	97,87	
5.3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	516.765.000,00	499.181.550,00	96,60	
5.3.1	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	516.765.000,00	499.181.550,00	96,60	

Realisasi anggaran program dan kegiatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 18
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	604.121.847.986,84	607.525.465.986,84	3.403.618.000,00	0,56	575.004.529.642,20	94,65
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	604.121.847.986,84	607.525.465.986,84	3.403.618.000,00	0,56	575.004.529.642,20	94,65
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	471.147.974.107,34	471.147.974.107,34	0,00	0,00	442.810.771.797,20	93,99
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.770.500,00	398.770.500,00	0,00	0,00	332.038.151,00	83,27
1.1.1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	287.583.500,00	287.583.500,00	0,00	0,00	255.557.289,00	88,86
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	22.741.000,00	90,96
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	22.291.000,00	89,16
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.187.000,00	61.187.000,00	0,00	0,00	31.448.862,00	51,40
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.536.407.045,00	143.536.407.045,00	0,00	0,00	134.869.986.699,00	93,96

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	136.702.944.545,00	136.702.944.545,00	0,00	0,00	128.342.616.362,00	93,88
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.486.812.500,00	6.486.812.500,00	0,00	0,00	6.216.437.795,00	95,83
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	346.650.000,00	346.650.000,00	0,00	0,00	310.932.542,00	89,70
1.4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	4.493.300,00	44,93
1.4.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	4.493.300,00	44,93
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	372.854.050,00	86,71
1.5.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	13.490.500,00	44,97
1.5.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	359.363.550,00	89,84
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.964.900,00	543.964.900,00	0,00	0,00	460.419.326,00	84,64
1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	9.274.000,00	37,10
1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.832.200,00	93.832.200,00	0,00	0,00	84.493.900,00	90,05
1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.060.600,00	24.060.600,00	0,00	0,00	22.429.000,00	93,22
1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.750.900,00	119.750.900,00	0,00	0,00	91.900.000,00	76,74
1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.781.200,00	43.781.200,00	0,00	0,00	42.770.550,00	97,69
1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	94,75
1.6.7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	23,69
1.6.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.540.000,00	180.540.000,00	0,00	0,00	179.420.451,00	99,38
1.6.9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	14.023.425,00	56,09
1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.358.100,00	383.358.100,00	0,00	0,00	319.742.400,00	83,41
1.7.2.	Pengadaan Mebel	36.773.600,00	36.773.600,00	0,00	0,00	32.026.600,00	87,09
1.7.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.444.900,00	229.444.900,00	0,00	0,00	197.046.001,00	85,88
1.7.4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.139.600,00	92.139.600,00	0,00	0,00	81.234.799,00	88,16
1.7.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00	37,74

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.548.000,00	2.738.548.000,00	0,00	0,00	2.332.557.689,00	85,17
1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2.535.007.319,00	2.535.007.319,00	0,00	0,00	2.287.212.739,00	90,23
1.8.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.540.681,00	198.540.681,00	0,00	0,00	40.344.950,00	20,32
1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	370.625.616,00	92,90
1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	24.438.500,00	97,75
1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.680.000,00	113.680.000,00	0,00	0,00	112.784.896,00	99,21
1.9.3.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	92,00
1.9.4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.270.000,00	50.270.000,00	0,00	0,00	42.635.450,00	84,81
1.9.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	98.614.000,00	98,61
1.9.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	69.904.770,00	93,21
1.9.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	17.648.000,00	58,83
1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	322.707.975.562,34	322.707.975.562,34	0,00	0,00	303.748.054.566,20	94,12
1.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	322.707.975.562,34	322.707.975.562,34	0,00	0,00	303.748.054.566,20	94,12
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.712.815.779,50	133.116.433.779,50	3.403.618.000,00	2,62	129.012.760.417,00	96,92
2.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.706.890.492,00	40.306.890.492,00	1.600.000.000,00	4,13	38.526.815.071,00	95,58
2.1.1.	Pengembangan Puskesmas	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00	10.682.134.700,00	98,91

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
2.1.3.	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	18.766.196.000,00	19.366.196.000,00	600.000.000,00	3,20	18.788.140.667,00	97,02
2.1.5.	<i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>	8.784.869.492,00	9.784.869.492,00	1.000.000.000,00	11,38	8.741.841.566,00	89,34
2.1.6.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</i>	355.825.000,00	355.825.000,00	0,00	0,00	314.698.138,00	88,44
2.2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	90.344.455.179,50	92.148.073.179,50	1.803.618.000,00	2,00	89.848.618.796,00	97,50
2.2.1.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	2.471.426.000,00	2.471.426.000,00	0,00	0,00	2.465.187.000,00	99,75
2.2.2.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	191.040.950,00	95,52
2.2.3.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	294.981.600,00	294.981.600,00	0,00	0,00	285.896.914,00	96,92
2.2.4.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	138.420.450,00	98,87
2.2.5.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	1.252.946.000,00	1.252.946.000,00	0,00	0,00	1.245.286.700,00	99,39
2.2.6.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	753.378.100,00	753.378.100,00	0,00	0,00	708.343.566,00	94,02
2.2.7.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00	105.818.400,00	97,89
2.2.8.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	49.819.925,00	99,64
2.2.9.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	84.352.575,00	99,24
2.2.10.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	348.550.000,00	348.550.000,00	0,00	0,00	344.981.575,00	98,98
2.2.11.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	1.311.790.000,00	1.311.790.000,00	0,00	0,00	1.287.941.800,00	98,18
2.2.12.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	0,00	418.575.375,00	91,39
2.2.13.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	343.698.500,00	98,20
2.2.14.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	5.930.720.200,00	6.580.720.200,00	650.000.000,00	10,96	6.533.877.592,00	99,29

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
2.2.15.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	252.584.600,00	252.584.600,00	0,00	0,00	247.577.575,00	98,02
2.2.16.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	763.050.300,00	763.050.300,00	0,00	0,00	513.794.249,00	67,33
2.2.17.	<i>Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</i>	399.458.400,00	399.458.400,00	0,00	0,00	385.943.850,00	96,62
2.2.18.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	24.852.027,00	99,41
2.2.19.	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	542.172.000,00	542.172.000,00	0,00	0,00	540.533.000,00	99,70
2.2.20.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	15.975.400,00	15.975.400,00	0,00	0,00	15.671.000,00	98,09
2.2.21.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>	85.730.000,00	85.730.000,00			85.650.000,00	
2.2.22.	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	3.644.238.000,00	3.644.238.000,00	0,00	0,00	3.437.187.959,00	94,32
2.2.23.	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	61.783.992.179,50	62.937.610.179,50	1.153.618.000,00	1,87	61.499.947.687,00	97,72
2.2.24.	<i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional</i>	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	31.960.000,00	61,46
2.2.25.	<i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	329.251.400,00	329.251.400,00	0,00	0,00	327.185.777,00	99,37
2.2.26.	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	4.558.881.000,00	4.558.881.000,00	0,00	0,00	4.548.438.148,00	99,77
2.2.27.	<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	519.981.000,00	519.981.000,00	0,00	0,00	494.017.720,00	95,01
2.2.28.	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>	314.719.000,00	314.719.000,00	0,00	0,00	305.217.305,00	96,98
2.2.29.	<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	28.045.500,00	84,60
2.2.30.	<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	56.539.000,00	56.539.000,00	0,00	0,00	50.798.550,00	89,85
2.2.31.	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	358.242.000,00	358.242.000,00	0,00	0,00	355.650.535,00	99,28
2.2.32.	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>	86.750.000,00	86.750.000,00	0,00	0,00	84.483.817,00	97,39
2.2.33.	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</i>	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	56.089.875,00	98,06

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
2.2.34.	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00	43.307.425,00	83,61
2.2.35.	<i>Pengelolaan Kawasan tanpa rokok</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	67.168.525,00	95,96
2.2.36.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi</i>	622.459.000,00	622.459.000,00	0,00	0,00	621.968.000,00	99,92
2.2.37.	<i>Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</i>	1.157.560.000,00	1.157.560.000,00	0,00	0,00	1.071.058.950,00	92,53
2.2.38.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan</i>	301.500.000,00	301.500.000,00	0,00	0,00	301.500.000,00	100,00
2.2.39.	<i>Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>	507.330.000,00	507.330.000,00	0,00	0,00	507.330.000,00	100,00
2.3.	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	452.268.108,00	452.268.108,00	0,00	0,00	433.621.225,00	95,88
2.3.1	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	452.268.108,00	452.268.108,00	0,00	0,00	433.621.225,00	95,88
2.4.	<i>Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	209.202.000,00	209.202.000,00	0,00	0,00	203.705.325,00	97,37
2.4.1.	<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>	101.091.000,00	101.091.000,00	0,00	0,00	96.726.250,00	95,68
2.4.2.	<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	108.111.000,00	108.111.000,00	0,00	0,00	106.979.075,00	98,95
3.	<i>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</i>	1.591.791.000,00	1.591.791.000,00	0,00	0,00	1.566.221.178,00	98,39
3.1.	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	63.082.000,00	97,05
3.1.1.	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	38.986.000,00	97,47
3.1.2.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	24.096.000,00	96,38
3.2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	352.624.000,00	352.624.000,00	0,00	0,00	341.273.550,00	96,78
3.2.1.	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	48.532.500,00	97,07
3.2.2.	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	48.369.000,00	96,74

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
3.2.3.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	252.624.000,00	252.624.000,00	0,00	0,00	244.372.050,00	96,73
3.3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.174.167.000,00	1.174.167.000,00	0,00	0,00	1.161.865.628,00	98,95
3.3.1.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.174.167.000,00	1.174.167.000,00	0,00	0,00	1.161.865.628,00	98,95
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	632.302.000,00	632.302.000,00	0,00	0,00	617.083.800,00	97,59
4.1	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60.063.000,00	60.063.000,00	0,00	0,00	58.005.000,00	96,57
4.1.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	60.063.000,00	60.063.000,00	0,00	0,00	58.005.000,00	96,57
4.2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	572.239.000,00	572.239.000,00	0,00	0,00	559.078.800,00	97,70
4.2.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	572.239.000,00	572.239.000,00	0,00	0,00	559.078.800,00	97,70
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.036.965.100,00	1.036.965.100,00	0,00	0,00	997.692.450,00	96,21

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2025	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
5.1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	411.700.100,00	411.700.100,00	0,00	0,00	392.327.000,00	95,29
5.1.1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	411.700.100,00	411.700.100,00	0,00	0,00	392.327.000,00	95,29
5.2.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	106.183.900,00	97,87
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	106.183.900,00	97,87
5.3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	516.765.000,00	516.765.000,00	0,00	0,00	499.181.550,00	96,60
5.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	516.765.000,00	516.765.000,00	0,00	0,00	499.181.550,00	96,60

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN DAERAH

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai fungsi untuk Penyusunan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan evaluasi, pelaporan bidang kesehatan, dan Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak tahun 2025 melaporkan bahwa rata-rata capaian kinerja program sebesar 103,90% dan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 94,65%. Capaian Kinerja pada indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat sebesar 100,02% (**Kategori Sangat Tinggi**), Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 100% (**Kategori Sangat Tinggi**), Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 98,85% (**Kategori Sangat Tinggi**), Indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target tercapai 88,89% (**Kategori Tinggi**), indikator Angka Harapan Hidup tercapai 100,22% (**Kategori Sangat Tinggi**), indikator Angka Kematian Bayi (AKB) tercapai 107,17% (**Kategori Sangat Tinggi**), indikator Angka Kematian Ibu (AKI) tercapai 139,99% (**Kategori Sangat Tinggi**), indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya tercapai 100% (**Kategori Sangat Tinggi**), dan indikator Persentase Desa Siaga aktif mandiri tercapai 100% (**Kategori Sangat Tinggi**).

Berdasarkan rumusan penghitungan efisiensi dan efektivitas terhadap capaian kinerja dan anggaran pada tujuan Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan efektivitas sebesar 106,38% dan efisiensi sebesar 6,00% (**Sudah efektif dan efisien**), pada tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan efektivitas sebesar 105,23% dan efisiensi sebesar 4,92% (**Sudah efektif dan efisien**), sedangkan pada tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat efektivitas sebesar 103,40% dan efisiensi sebesar 3,29% (**Sudah efektif dan efisien**). Sedangkan pada sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif efektivitas sebesar 106,37% dan efisiensi sebesar 5,99% (**Sudah efektif dan efisien**), sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan efektivitas sebesar 94,63% dan efisiensi sebesar -5,04%

(Belum efektif dan efisien), sasaran Menurunnya Angka Kematian efektivitas sebesar 127,51% dan efisiensi 26,66% **(Sudah efektif dan efisien)**, sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan efektivitas sebesar 101,87% dan efisiensi 1,83% **(Sudah efektif dan efisien)**, dan sasaran Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat efektivitas sebesar 103,94% dan efisiensi 3,79% **(Sudah efektif dan efisien)**. Dari perhitungan rumus efektifitas dan efisiensi terdapat 1 sasaran yang belum efektif dan efisien yaitu sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan.

4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Hasil dari Laporan LkjlP ini akan digunakan sebagai bahan utama dalam menyusun RKPD dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Daerah tahun berikutnya sebagai langkah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan memastikan siklus perencanaan yang berbasis kinerja. Selain itu, pada Rencana Strategi yang telah diidentifikasi serta dikaji berdasarkan pengumpulan data bersama Tim Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Nomor 440/4092 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Nomor 440/038/2025 Tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Daerah di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan public, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan, dan responsibility dalam pemberian informasi.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan kualitas pelayanan Puskesmas PONEK dan RS PONEK.
4. Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dan penguatan survailans penyakit dan mutu serta cakupan imunisasi;
5. Meningkatkan status gizi melalui pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk, cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, serta deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD;


6. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan melalui pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan, sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan serta pelayanan laboratorium kesehatan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, tugas belajar, kursus, bimbingan teknik program, dan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
8. Meningkatkan Jaminan akses pelayanan kesehatan dengan Premi asuransi pembiayaan kesehatan masyarakat;
9. Meningkatkan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS dengan sosialisasi dan advokasi regulasi upaya promotif dan preventif melalui GERMAS, serta Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media.
10. Meningkatkan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat
11. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dibidang kesehatan dan optimalisasi UKBM (Posyandu, Posbindu, SBH, PKK, ormas keagamaan).

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 untuk perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK TIM MONEV TAHUN 2025

 **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**
DINAS KESEHATAN DAERAH
 Jalan Sultan Hadriwijaya Nomor 44 Demak 59515
 Telepon (0291) 885934 Faksimile (0291) 685934
 Laman : <https://dinkes.demakkab.go.id>; Pos-el : dinkes@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 NOMOR 440/4092

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 NOMOR 440/038/2025 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN
 KINERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

b. bahwa penetapan tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagaimana dimaksud huruf a. perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH NOMOR 440/3507 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH NOMOR 440/038/2025 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lingkup Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

a. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;


b. Mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengolah data yang diperlukan guna melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

c. Membahas, mendiskusikan, merumuskan masalah serta solusi pemecahan masalah dan membuat Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Demak
 Pada tanggal : 23 Oktober 2025.

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN DEMAK


 dr. Ali Maimun, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197104102002121007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 NOMOR : 440/4092
 TANGGAL : 23 Oktober 2025.

TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
 DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		TIM	DINAS
1	dr. Ali Maimun, M.Kes	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Daerah
2	Nani Amrin, SKM., M.Kes	Sekretaris	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah
3	Heri Winarno, SKM, M.Kes	Anggota	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4	Sri Puji Astuti, SKM, M. Kes	Anggota	Kabid Kesehatan Masyarakat
5	dr. Haerudin	Anggota	Kabid Sumber Daya Kesehatan
6	Dian Arisanti, S.Si.Apt, MH.Kes.	Anggota	Kabid Pelayanan Kesehatan

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN DEMAK


 dr. Ali Maimun, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197104102002121007

LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA MURNI DAN PERUBAHAN ESELON 2 DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN DAERAH
 Jalan Sultan Hadrawijaya Nomor 44 Demak 59515
 Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934
 Laman : dinkes.demakkab.go.id; Pos-el : dinkes@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Ali Maimun, M.Kes.
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisthanah, S.E.
 Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 4 Februari 2025

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisthanah, S.E.

Pihak Pertama,



dr. Ali Maimun, M.Kes.
 Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I
 NIP. 197104102002121007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,13
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,62 tahun
3.1	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,41 Per 1000
		Angka Kematian Ibu (AKI)	63,50 Per 100.000 KLH
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	100%
3.3	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	84,70%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 449.203.456.660,00	DAU, PAJAK ROKOK, DAK FISIK, BLUD, PAD
2.	Program Pemenuhan Upeya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 130.939.981.550,00	DAU, DBHCHT, BANKEU, PAJAK ROKOK, DAK FISIK, DAK NON FISIK



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN DAERAH
 Jalan Sultan Hadrawijaya Nomor 44 Demak 59515
 Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934
 Laman : dinkes.demakkab.go.id; Pos-el : dinkes@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, dr. ALI MAIMUN, SKM, M. Kes. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

- BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
- TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
- BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
- MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
- SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
- AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
- BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 4 Februari 2025

Menyaksikan



Bupati Demak,
 dr. Hj. Eisthanah, S.E.

Menyatakan



dr. Ali Maimun, M.Kes.
 Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I
 NIP. 197104102002121007



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jalan Sultan Hadwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934

Laman : <https://dinkes.demakkab.go.id/>; Pos-el : dinkes@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Ali Maimun, M. Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Desember 2025

Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

dr. Ali Maimun, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP 19710410 200212 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang diindaklanjuti	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,13
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,91 tahun
3.1	Menurunya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)	7,26 Per 1000 KLH 63,60 Per 100 000 KLH
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	100%
3.3	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 471.147.974.107,34	DAU, PAJAK ROKOK, DAK FISIK, PAD, BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 133.116.433.779,50	DAU, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DAK FISIK, DAK NON FISIK, Insentif Fisikal
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.581.791.000,00	DAU, DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp. 632.302.000,00	DAU, DAK NON FISIK
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.036.965.100,00	DAU, DAK NON FISIK, DBHCHT

Demak, Desember 2025

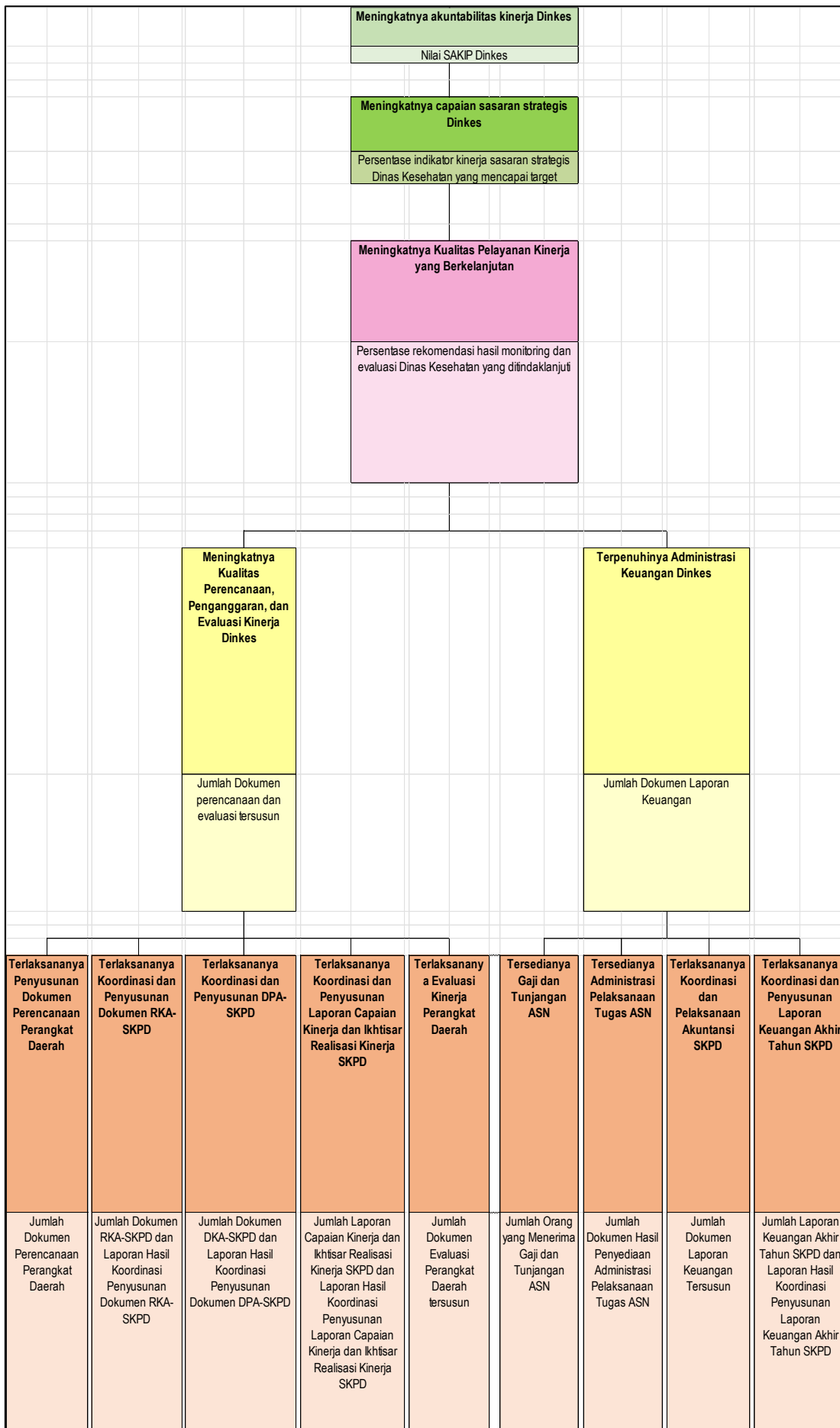
Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

dr. Ali Maimun, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP 19710410 200212 1 007

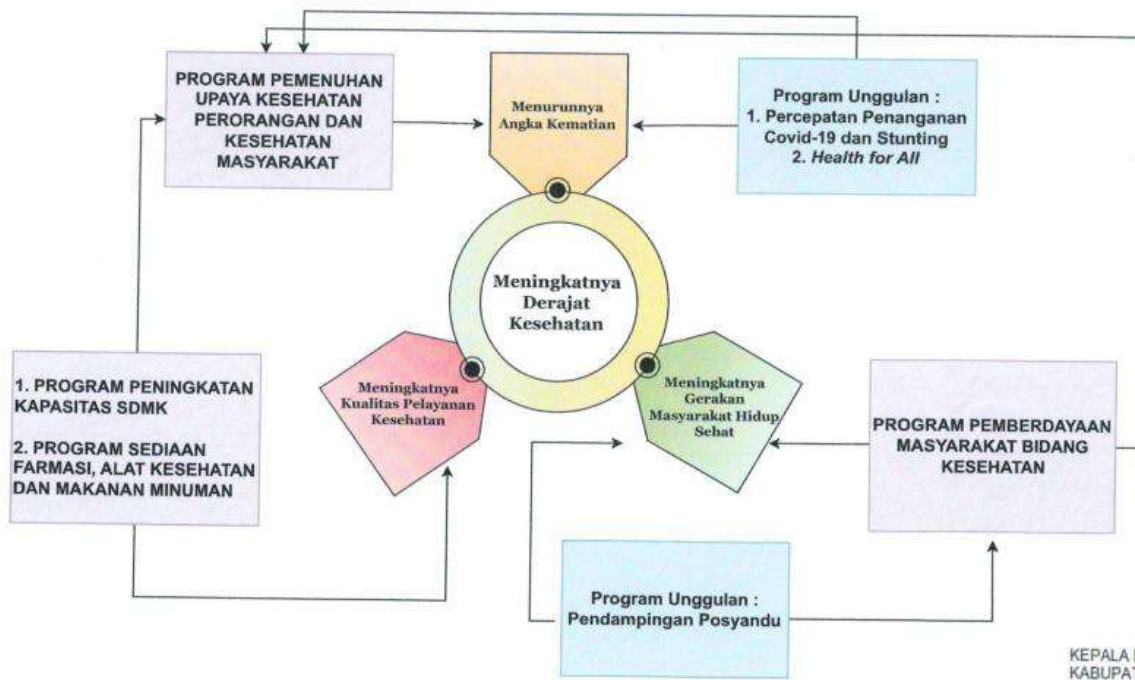
LAMPIRAN 4 : POHON KINERJA 2023-2026



Versi Lengkap Pokin pada link <https://bit.ly/LampiranLKJIPPokin>

LAMPIRAN 5 : CROSSCUTTING DINAS KESEHATAN DAERAH

CROSSCUTTING
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK 2023-2026



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

dr. ALI MAIMUN, M.KES
Pembina Tingkat I
NIP. 197104102002121007

LAMPIRAN 6 : FOTO - FOTO KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA TAHUN 2025

1) Pencegahan penyakit menular dan tidak menular



Sosialisasi dan Skrining HIV/AIDS



Cek Kesehatan Gratis (CKG)



Kegiatan Posbindu



Sosialisasi Dan Skrining Malaria



Kegiatan Edukasi Remaja untuk Waspada DBD



Kegiatan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

2) Kegiatan dalam Upaya peningkatan Gizi, Pencegahan Gizi Buruk, Pencegahan AKI dan AKB.



Pendampingan Ibu Hamil Risti



Pelayanan Rumah Gizi Balita



Monitoring PMT Lokal



Kegiatan Peduli Stunting bersama Polres Demak



Pelayanan KB Pasca Salin bersama tim BKKBN RI



Peningkatan Peran PKK dan Kader dalam Pencegahan dan penurunan AKI, AKB, dan Stunting

3) Kegiatan dalam upaya Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan.



Kegiatan Visitasi Perpanjangan Apotek bersama Tim Dinkes dan Dinpmptsp



Visitasi Rumah sakit dalam rangka Ijin Operasional



Visitasi Perpanjangan Klinik



Visitasi ijin operasional praktek mandiri

4) Kegiatan Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS.



Peregangan bersama pada jam kerja di Lingkungan Dinkes



SENAM GERMAS Bersama di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah



Senam Bersama dalam peringatan hari Lansia ke 27 di Kabupaten Demak



Kegiatan Rockport sebagai Pengukuran tingkat kebugaran

5) Peningkatan Mutu pelayanan dan Optimalisasi sumberdaya manusia yang ada.



Peningkatan Mutu Puskesmas



Pelaksanaan Uji Kredensial Dokter Gigi



Survey Penilaian Akreditasi Puskesmas



Koordinasi penguatan sistem rujukan DES PSC119

LAMPIRAN 7 : DAFTAR PRESTASI TAHUN 2025

NO	PRESTASI	TAHUN
	TINGKAT NASIONAL	
1	Kabupaten/Kota Sehat Swati Saba Padapa	2025
2	Penghargaan atas Prestasi sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024	2025
3	Puskesmas Karanganyar I Pemenang Video Inovasi Terbaik 2 dalam rangka Peingatan Hari AIDS Sedunia (HAS) 1 Desember 2025	2025
	TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH	
4	Kinerja Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Terbaik 2025	2025
5	Kabupaten / Kota dengan ketertiban Pembayaran luran jaminan kesehatan juara ke 2	2025
6	Kabupaten/Kota dengan Kontribusi Tertinggi Pertama dalam Pelaksanaan Implementasi Kolaborasi TBC-HIV	2025
	TINGKAT KABUPATEN	
7	Dokumen Perencanaan Terbaik Tingkat Kabupaten	2025

LAMPIRAN 8: DATA KEMATIAN BAYI TAHUN 2025

DATA DUKUNG REALISASI KINERJA INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NO	Puskesmas	Lahir Hidup		Σ Lahir hidup	Σ Lahir mati				Kematian Neonatal						Sebab Kematian Neonatal												
		<2500gr	≥2500gr		L	P	tak jelas	T	Σ Kematian 0-6 hari			Σ Kematian 7-28 hari			Jumlah Kematian Neonatal	prematurn	BBLR/ IUGR	Asfiksia	RDS/ SGNN	Tetanus Neonaturum	Sepsis	Kelainan Kongenital	Kongenital Pneumonia	PJB	Ikterus	peny pencer naan	Lain-lain
									L	P	T	L	P	T													
1	2	3	4	5	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18		19	20		21	22	23			24		25
1	MRANGGEN I	33	688	721	1	2		3	2	1	3	1	1	2	5	1		3								1	
2	MRANGGEN II	13	731	744	1	2		3		1	1	1		1	2		1				1						
3	MRANGGEN III	28	699	727	4			4	1		1	2		2	3	2				1							
4	KARANGAWEN I	31	554	585	1			1	1	1	2			0	2		2										
5	KARANGAWEN II	37	661	698				0	1	3	4	1	1	2	6	1	2					3					
6	GUNTUR I	37	652	689				0	2		2			0	2		1				1						
7	GUNTUR II	25	564	589	2	1		3	1	1	2			0	2		1		1								
8	SAYUNG I	26	533	559	1	1		2			0			0	0												
9	SAYUNG II	37	757	794	4	3		7	2		2	1	1	2	4	1				1	1			1			
10	KARANGTENGAH	30	997	1027	3	1		4	1	2	3	1	2	3	6	2		1				2	1				
11	BONANG I	32	831	863		2		2	2	2	4	1		1	5	1	4						1				
12	BONANG II	45	600	645		3		3	2	1	3		1	1	4	1		1		2							
13	DEMAK I	7	430	437	1	3		4			0	1		1	1	1											
14	DEMAK II	21	404	425	2	1		3		2	2			0	2		1	1									
15	DEMAK III	23	529	552	1	2		3			0	1	1	2	2	1		1									
16	WONOSALAM I	13	593	606	1	2		3	2	1	3		1	1	4		3					1					
17	WONOSALAM II	12	470	482		1		1	2	2	4	1		1	5	1	3					1					
18	DEMPET	30	597	627	3	4		7			0	2		2	2											2	
19	KEBONAGUNG	17	462	479				0		1	1	2		2	3	1	1									1	
20	GAJAH I	13	405	418				0			0			0	0												
21	GAJAH II	8	218	226	2			2			0			0	0												
22	KARANGANYAR I	17	399	416	3			3			0	1		1	1		1										
23	KARANGANYAR II	52	537	589	1	2		3	3	4	7	1		1	8	3	4									1	
24	MIJEN I	13	382	395	1	2		3			0			0	0												
25	MIJEN II	17	343	360	1			1	1	2	3			0	3	1	1	1									
26	WEDUNG I	22	623	645	2	3		5	1	2	3		2	2	5	1	2			2							
27	WEDUNG II	17	436	453	2	3		5	1		1			0	1		1										
	TOTAL	656	15095	15751	37	38	0	75	25	26	51	17	10	27	78	18	3	32	2	0	6	5	6	1	0	5	0

LAMPIRAN 9: DATA KEMATIAN IBU TAHUN 2025

NO	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN IBU									KETERANGAN LAIN-LAIN
		PERDARAHAN	GANGGUAN HIPERTENSI/ PEB	INFEKSI	KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	GANGGUAN AUTOIMUN	GANGGUAN CEREBROVASKULAR	KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS)	LAIN-LAIN	JUMLAH KEMATIAN IBU	
1	BONANG 1									0	
2	BONANG 2									0	
3	DEMAK 1									0	
4	DEMAK 2									0	
5	DEMAK 3									0	
6	DEMPET									0	
7	GAJAH 1									0	
8	GAJAH 2									0	
9	GUNTUR 1									0	
10	GUNTUR 2									0	
11	KARANGANYAR 1									0	
12	KARANGANYAR 2									0	
13	KARANGAWEN 1			1					1	2	PENYAKIT HATI
14	KARANGAWEN 2									0	
15	KARANGTENGAH									0	
16	KEBONAGUNG									0	
17	MIJEN 1									0	
18	MIJEN 2									0	
19	MRANGGEN 1		1						1	2	HYPERTIROID
20	MRANGGEN 2									0	
21	MRANGGEN 3		1							1	
22	SAYUNG 1									0	
23	SAYUNG 2									0	
24	WEDUNG 1									0	
25	WEDUNG 2									0	
26	WONOSALAM 1									0	
27	WONOSALAM 2	1								1	
JUMLAH		1	2	1	0	0	0	0	2	6	

LAMPIRAN 10: DATA DESA SIAGA AKTIF MANDIRI TAHUN 2025

DATA PERKEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NO	PUSKESMAS	STRATA DESA/KEL SIAGA AKTIF										FKD				KADER KESEHATAN		TOMATOGA	
		JUMLAH DESA/KEL SIAGA	%	PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		TERBENTUK		AKTIF		JML	DILATIH	JML	DILATIH
				JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BONANG I	11	100%	0	0%	0	0%	0	0%	11	100%	11	100%	11	100%	300	300	33	33
2	BONANG II	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	286	286	30	30
3	DEMAK I	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%	166	166	96	45
4	DEMAK II	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	7	100%	7	100%	7	100%	180	180	70	14
5	DEMAK III	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%	236	236	39	7
6	DEMPET	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	16	100%	16	100%	16	100%	423	423	16	16
7	GAJAH I	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	267	267	10	10
8	GAJAH II	8	100%	0	0%	0	0%	0	0%	8	100%	8	100%	8	100%	195	195	5	5
9	GUNTUR I	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	316	316	80	80
10	GUNTUR II	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	180	180	69	69
11	KARANGANYAR I	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	9	100%	9	100%	9	100%	180	180	18	18
12	KARANGANYAR II	8	100%	0	0%	0	0%	0	0%	8	100%	8	100%	8	100%	32	32	16	16
13	KARANGAWEN I	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%	207	207	35	25
14	KARANGAWEN II	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%	225	225	100	100
15	KARANGTENGAH	17	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	100%	17	100%	17	100%	385	385	85	85
16	KEBONAGUNG	14	100%	0	0%	0	0%	0	0%	14	100%	14	100%	14	100%	365	365	30	30
17	MIJEN I	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	9	100%	9	100%	9	100%	207	207	18	18
18	MIJEN II	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%	139	130	12	12
19	MRANGGEN I	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	7	100%	7	100%	7	100%	252	252	52	52
20	MRANGGEN II	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	9	100%	9	100%	9	100%	253	253	9	9
21	MRANGGEN III	3	100%	0	0	0	0	0	0%	3	100%	3	100	3	100%	666	662	115	115
22	SAYUNG I	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	315	315	10	10
23	SAYUNG II	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	350	350	10	10
24	WEDUNG I	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	232	232	10	10
25	WEDUNG II	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	190	190	50	50
26	WONOSALAM I	11	100%	0	0%	0	0%	0	0%	11	100%	11	100%	11	100%	253	253	6	6
27	WONOSALAM II	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	270	270	80	80
	JUMLAH	249	100%	0	0%	0	0%	0	0%	249	100%	249	100%	249	100%	7070	7057	1104	955

LAMPIRAN 11: DATA STATUS AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN 2025

NO	NAMA FASYANKES	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	MRANGGEN 1	Jl. Raya Mranggen 90, Kec. Mranggen	PARIPURNA
2	MRANGGEN 2	Jl. Raya Nggorawe, Kec. Mranggen	PARIPURNA
3	MRANGGEN 3	Jl. Pucang Gading Raya No. 54.Batu Sari, Kec. Mranggen	PARIPURNA
4	KARANGAWEN I	Jl. Raya Karangawen - Purwodadi Km 21, Kec. Karangawen	PARIPURNA
5	KARANGAWEN II	Ds. Tlogorejo, Kec.Karangawen	PARIPURNA
6	GUNTUR I	Jl. Raya Guntur, Kec.Guntur	PARIPURNA
7	GUNTUR II	Jl. Raya Pamongan - Genuk Ds. Pamongan, Kec.Guntur	PARIPURNA
8	SAYUNG I	Jl. Raya Semarang - Demak Ds. Purwosari , Kec.Sayung	PARIPURNA
9	SAYUNG II	Desa Tambakroto Kec. Sayung	PARIPURNA
10	KARANG TENGAH	Ds. Karangsari, Kec.Karang Tengah	PARIPURNA
11	BONANG I	Jl. Moro - Demak No. 50 , Kec. Bonang	PARIPURNA
12	BONANG II	Jl. Raya Demak - Wedung Km 10, Kec.Bonang	PARIPURNA
13	DEMAK I	Jl. Pemuda 38 No. 61 Kel Bintoro, Kec. Demak	PARIPURNA
14	DEMAK II	Jl. Raya Demak - Mijen , Kec. Demak	PARIPURNA
15	DEMAK III	Jl. Cempaka Raya No.5 Wijaya Kusuma II, Kec. Demak	PARIPURNA
16	WONOSALAM 2	Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam	PARIPURNA
17	WONOSALAM 1	Jl. Demak Purwodadi Km 5.5, Kec. Wonosalam	PARIPURNA
18	DEMPET	Jl. Raya Dempet . Dempet, Kec. Dempet	PARIPURNA
19	KEBONAGUNG	Jl. Raya Semarang Purwodadi Ds. Kebon Agung, Kec. Kebonagung	PARIPURNA
20	GAJAH 1	Jl. Raya Demak-Kudus No. 8 Ds. Gajah, Kec. Gajah	PARIPURNA
21	GAJAH 2	Ds. Tambirejo, Kec. Gajah	PARIPURNA
22	KARANGANYAR I	Ds. Raya Kudus-Demak Km 5 Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar	PARIPURNA
23	KARANGANYAR II	Jl. Raya Karanganyar-Mijen Ds. Kedungwaru Lor, Kec. Karanganyar	PARIPURNA
24	MIJEN I	Jl. Raya Mijen No. 68, Kec. Mijen	PARIPURNA
25	MIJEN II	Jl. Raya Jleper Ds. Jleper, Kec. Mijen	PARIPURNA
26	WEDUNG II	Jl. DR Azhari No. 04 Ds. Mutih Kulon, Kec. Wedung	PARIPURNA
27	WEDUNG I	Jl. Raya Angin-Angin No. 8, Kec. Wedung	PARIPURNA
28	RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	Jl. Sultan Fatah, Bogorame , Bintoro, Demak	PARIPURNA
29	RSUD Sultan Fatah	Jl. Semarang - Purwodadi KM. 21 RT. 002 RW. 001, Pundenarum, Karangawen	PARIPURNA